

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kompetensi Profesionalisme Guru

Secara etimologis, kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competence* yang berarti kecakapan, kemampuan, kompetensi, atau kewenangan, sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi diartikan sebagai kekuasaan (wewenang) untuk memutuskan atau memutuskan sesuatu, atau kemampuan menguasai tata bahasa secara abstrak atau internal⁴⁴.

Kompetensi dapat diartikan sebagai orang yang memiliki kekuasaan, wewenang, keterampilan, pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas tertentu⁴⁵. Prinsip kompetensi dalam dunia pendidikan dikaitkan dengan kompetensi pedagogik, personal, profesional dan sosial. Prinsip ini dirumuskan lebih rinci dan dituangkan dalam Permendiknas No. 6 Tahun 2007. Adapun dilihat dari kajiannya terkait dengan kompetensi pedagogik, personal, profesional, dan kompetensi sosial, tentunya hal ini berkaitan dengan kompetensi guru.

⁴⁴ Fauzi Ananda, "Implemetasi Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam" *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 14 (2022): 61–67

⁴⁵ Tanang & Abu. Teacher professionalism and professional development practices in South Sulawesi, Indonesia. *Journal of Curriculum and Teaching*.2014

Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Jika seorang manajer mengaku sebagai seorang yang profesional maka ia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya. Guru harus mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya. Secara sederhana, profesionalisme yang diartikan perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi⁴⁶.

Kompetensi seorang guru²⁶ an dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang kompeten (*capable*). Oleh karena itu, kompetensi profesional dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewibawaan guru dalam melaksanakan kegiatan mengajarnya dengan kemampuan yang tinggi. Dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan, kecakapan, keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan⁴⁷.

Kompetensi profesional guru merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat

⁴⁶ Zumrotu Faizah dkk, "Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Tahfidz Al-Asyhar Malang," *Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 3 (Jui, 2019), 135

⁴⁷ Sindi Sinora Mahulau and Khozin Nur, "Kompetensi Profesional Guru PAI Dalam Meningkatkan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 13 Seram Barat" (IAIN Ambon, 2016).

melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru terdiri dari 3 (tiga), yaitu kompetensi pribadi, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Keberhasilan guru dalam menjalankan profesinya sangat ditentukan oleh ketiganya dengan penekanan pada kemampuan mengajar⁴⁸.

Berdasarkan uraian di atas kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

Kompetensi guru adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam melakukan kewajibannya dalam proses pembelajaran maupun diluar proses pembelajaran dengan enuh tanggung jawab⁴⁹. Profesional berasal dari kata profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk memiliki keahlian, bertanggung jawab dan setia pada pekerjaannya tersebut. Kata profesional merujuk pada hal yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan dan kinerjanya dalam melaskan pekerjaan. Guru profesional

⁴⁸ Cut Fitriani dkk, "Kompetensi Profesiona Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran di MTs Muhammadiyah Banda Aceh," *Magister Administrasi Pendidikan*, 2 (Mei, 2017), 90.

⁴⁹ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional (Pedoman Kinerja, Kualifikasi Dan Kompetensi Guru)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014). hal. 97

merupakan guru yang bekerja dan mengajar sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya⁵⁰.

Dalam Standar Nasional Pendidikan dijelaskan pada Pasal 28 ayat (3) butir c menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah suatu kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam agar peserta didik dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Mampu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan diri⁵¹. Guru profesional dituntut memiliki kompetensi-kompetensi khusus. Selain itu, guru juga dituntut melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Menurut pasal 20 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya mempunyai beberapa kewajiban, yaitu: 1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

⁵⁰ Daryanto, *Standar Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru Profesional* (Yogyakarta: Gava Media, 2013). hal 17

⁵¹ Rofa'ah, *Pentingnya Kompetensi Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran Dalam Persepektif Islam* (Yogyakarta: DEEPPUBLISH, 2016). hal 78

Guru sebagai pekerjaan profesional juga memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam menjalankan tugasnya yang biasa disebut kompetensi guru. Kompetensi guru berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas keprofesionalannya⁵². Dengan penguasaan kompetensi-kompetensi itu, diharapkan dapat diwujudkan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Di dalam UU R.I. No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selanjutnya di dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kompetensi profesional guru adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, sedangkan kompetensi sosial berarti kemampuan guru untuk berkomunikasi dan

⁵² Rofa'ah, *Pentingnya Kompetensi Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran Dalam Persektif Islam* (Yogyakarta: DEEPPUBLISH, 2016). hal 54

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar⁵³.

Menurut Hamzah B Uno, kompetensi profesional merupakan suatu kemampuan yang harus ada dalam diri guru. Seorang guru wajib mempunyai kompetensi profesional yang mencakup , kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan pembelajaran⁵⁴. Profesionalisme berdasarkan KBBI berarti mutu atau kualitas dari seseorang yang profesional. Berdasarkan KBBI tersebut maka kata yang dapat digaris bawahi adalah orang yang profesional. Apabila dihubungkan dengan guru maka dapat kita artikan profesional guru adalah seorang guru yang dapat melaksanakan dan mewujudkan fungsi serta tugas dalam dunia pendidikan namun juga tidak melupakan untuk menekuni profesinya dengan ikut serta dalam pelatihan yang dapat mengembangkan kekayaan ilmiahnya.

Profesionalisme menurut istilah adalah suatu paham bahwa pekerjaan dikerjakan oleh orang ahli di dalam bidangnya yaitu orang yang memiliki profesi⁵⁵. Profesionalisme menurut⁵⁶ adalah suatu cita-

⁵³ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya).h. 14

⁵⁴ Hamzah B Uno, *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif Dan Efektif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). hal. 18-19

⁵⁵ Mulyasa, E. *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. (Bandung: Remaja Rosda Karya.2012). h.34

cita dari individu atau kelompok yang memiliki keinginan guna membedakan dirinya dengan yang lain. Sedangkan dalam definisi lain dikatakan bahwa profesional guru adalah seperangkat kemampuan seorang guru yang memiliki keahlian tertentu, serta memiliki keinginan dalam jiwanya untuk memberikan pengabdian kepada orang lain⁵⁷.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru adalah seperangkat keahlian yang dimiliki oleh pendidik dan dalam jiwanya tertanam keinginan mengabdikan kepada masyarakat untuk menyalurkan keahlian yang dimiliki dan keahlian tersebut senantiasa terupdate.

Menurut Imam Al-Ghazali sosok guru yang profesional ialah guru yang cerdas dan sempurna akalannya juga guru yang baik akhlaknya dan kuat jasmaninya. Guru yang cerdas dan sempurna akalannya akan memiliki pemahaman ilmu pengetahuan yang luas begitu juga dengan baik akhlaknya akan menjadi contoh dan suri tauladan bagi peserta didiknya dan dengan sehat jasmaninya guru dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dikelas⁵⁸.

⁵⁶ Arikunto, S & Yuliana, L. *Manajemen pendidikan*. (Yogyakarta: Aditya Media)2012.h.54

⁵⁷ Arikunto, S & Yuliana, L. *Manajemen pendidikan*. (Yogyakarta: Aditya Media)2012.h.54

⁵⁸ Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam (Gagasan-Gagasan*

Imam Al-Ghazali menyatakan tugas guru profesional secara khusus meliputi: *Pertama* memiliki rasa kasih sayang, karena praktek mengajar merupakan suatu keahlian dari profesi seorang guru jadi rasa kasih sayang penting ditimbulkan agar adanya rasa percaya diri dan rasa tenang pada diri peserta didik dan guru. *Kedua* guru profesional yang mengajar haruslah orang yang memiliki ilmu, jadi seorang guru dalam mengajar tidak boleh mengharapkan pujian dan upah dari peserta didiknya. Guru harus mengajarkan ilmu kepada peserta didiknya semata-mata karena Allah SWT. *Ketiga* guru harus memiliki kemampuan dalam mengarahkan peserta didik dan menjadi pengawas yang jujur bagi peserta didiknya. Jadi dapat disimpulkan, Kompetensi Profesional Guru merupakan kemampuan guru dalam menguasai pembelajaran mencakup: merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Profesional guru merupakan seseorang yang mempunyai kecakapan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal dengan wawasan dan pengalaman yang dimilikinya. Kemampuan profesional guru tersebut

memiliki pengaruh terhadap penerapan pembelajaran tematik yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik.

Kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara layak dan penuh tanggung jawab juga termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 terkait Standar Kualifikasi akademik dan Kompetensi Guru yang dikembangkan kedalam empat kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang didapatkan melalui pendidikan profesi.

Dalam Marno dan M.Idris menyebutkan guru yang mempunyai kompetensi profesional harus dapat memenuhi kriteria diantaranya 1) guru mampu menguasai bidang studi yang diajarkan, 2) guru mampu memahami kondisi peserta didik, 3) guru mampu memahami prinsip-prinsip dan teknik dalam mengajar, 4) guru mampu menguasai cabang ilmu pengetahuan yang masih ada kaitannya dengan bidang studi yang diajarkan, dan 5) guru dapat menghargai profesinya⁵⁹. Indikator keberhasilan kompetensi profesional guru menurut khoiri yakni 1) guru mampu menguasai disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber pelajaran,

⁵⁹ Marno dan M.Idris, *Strategi Dan Metode Pengajaran* (Yogyakarta: X: Ar-ruzz Media, 2009). hal. 39

2) guru mampu memahami filsafat dan tujuan pendidikan, 3) guru mampu menguasai metode dan model pengajaran, 4) guru menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, dan 5) guru mampu melakukan penilaian selama proses pembelajaran⁶⁰.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa untuk bisa mencapai kemampuan profesional guru diperlukan guru yang bisa 1) menguasai materi mata pelajaran yang diampunya, 2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar, 3) mengembangkan pembelajaran secara kreatif, dan 4) melakukan tindakan reflektif, dan 5) menguasai teknologi informasi dalam melakukan komunikasi.

Pengembangan Guru perlu dilakukan pada setiap sekolah untuk memastikan bahwa mereka tetap dapat mempertahankan kualitas profesionalitasnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Program pengembangan tersebut memberi penekanan pada pembentukan keterampilan profesional mereka guna perbaikan layanan sekolah. Cara yang dapat di tempuh oleh sekolah dengan melibatkan guru dengan mengikuti misalnya kegiatan pelatihan-pelatihan, penataran, seminar, workshop, pemagangan, dan pendampingan, yang dapat

⁶⁰ Hoyyima Khoiri, *Jitu Dan Mudah Lulus Sertifikasi Guru* (Jogjakarta: Bening, 2010). hal. 43

diselenggarakan oleh pemerintah, perguruan tinggi, atau lembaga non-pemerintah⁶¹.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan profesi guru dalam pendidikan memang sangatlah diperlukan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya pengembangan profesi tersebut diharapkan guru dapat senantiasa memunculkan suatu inovasi-inovasi baru berdasarkan pengalaman yang sudah di dapatkan. Pengembangan guru dapat dilakukan seperti mengikuti pelatihan, seminar, workshop dan lain-lain.

B. Standar Kompetensi Guru

Guru merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan yang secara umum perlu mendapatkan perhatian maksimal. Hal ini dikarenakan guru akan mendapatkan perhatian strategis ketika berbicara tentang pendidikan. Dengan adanya sorotan strategis dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas maka perlu dikembangkan sebagai tenaga profesi yang profesional.

Guru harus menjadi pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

⁶¹ E Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Madrasah* (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 67

mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dalam kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu⁶². Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional dimaksud berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Maka dari itu guru memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional agar generasi penerus bangsa mampu mengharumkan nama bangsa. Seorang guru dalam konsep Islam adalah orang yang dapat mengarahkan manusia ke jalan kebenaran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah Rasulullah. Jadi, definisi mendidik dalam konsep islam adalah proses ketika pendidikan tersebut dapat mengangkat derajat manusia (peserta didik) menuju kedudukan yang lebih mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian ini sejalan dengan definisi pendidikan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali sebagai berikut. Mendidik adalah menyempurnakan, membersihkan,

⁶² Ali mudlofir, *Pendidik Profesional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) h.119-120

menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. karena tujuan pendidikan islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 16 Tahun 2007 menyebutkan Standar kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang dipaparkan yaitu (1) Kompetensi pedagogik merupakan keterampilan mengajar adalah tentang memahami siswa, merencanakan dan melaksanakan pengajaran, menilai hasil belajar, dan mengembangkan siswa untuk benar-benar mewujudkan berbagai potensi yang dimilikinya. (2) Kompetensi kepribadian adalah prestasi pribadi yang menunjukkan kepribadian yang stabil, dewasa, cerdas dan dinamis, menjadi teladan bagi siswa, dan memiliki karakter yang baik. (3) Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, rekan pendidik, pengajar, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. (4) Kompetensi profesional adalah penguasaan bahan ajar dalam arti yang lebih luas dan mendalam, yang meliputi penguasaan mata pelajaran.

Oleh karena itu guru tidak hanya meningkatkan keterampilan profesional dan keterampilan pedagogik dalam mengembangkan kompetensinya. Namun, sangat penting untuk mengasah keterampilan kepribadian untuk menjadikan uswatun hasanah bagi siswa. Dengan demikian kapasitas pribadi guru pendidikan Islam menurut Az-Zarnuji penting untuk dimiliki agar para pendidik dapat meneladaninya dan menerapkannya pada pribadinya masing-masing⁶³.

Guru yang efektif akan mampu mengelola pembelajarannya dengan lebih efektif, sehingga pembelajaran siswa menjadi maksimal. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dalam Pasal 1 angka 1 didefinisikan bahwa guru adalah tenaga profesional yang tugas utamanya mengajar, membimbing, memimpin, melatih, dan mengevaluasi peserta didik serta mengevaluasinya dalam pendidikan formal, pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Pendidikan dan Kompetensi Guru, berbagai kompetensi yang harus dimiliki guru yang meliputi keterampilan akademik, kepribadian, profesional, dan sosial diperoleh melalui pembelajaran fungsional. Dari keempat kompetensi guru

⁶³ Muhammad Anas Ma'arif, "Analisis Konsep Kompetensi Kepribadian Guru PAI Menurut Az-Zarnuji," *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2017): 35–60.

tersebut, kompetensi pedagogik guru memegang peranan yang paling penting dalam pengajaran secara umum maupun dalam praktik mengajar karena guru memegang peranan penting dalam proses, dimana proses pengajaran merupakan inti dari semua proses pengajaran yang melibatkan aspek-aspek kompetensi guru⁶⁴.

Guru melaksanakan tugas tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan Negara yaitu mendidik anak bangsa. Guru melaksanakan tugas mendidik dan mengajar karena kesadarannya mengemban jabatan profesional guru atas dasar kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya kemampuan untuk memandang dan mendekati masalah-masalah pendidikan dari perspektif masyarakat global, kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain secara kooperatif dan tanggung jawab sesuai dengan peranan dan tugas dalam masyarakat dan Kapasitas kemampuan berfikir secara kritis dan sistematis.

Guru profesional adalah guru yang melaksanakan tugas keguruan dengan kemampuan tinggi (profesiensi) sebagai sumber kehidupan. Dalam menjalankan kewenangan profesionalnya, guru dituntut memiliki keanekaragaman kecakapan (competencies) psikologis yang

⁶⁴ Khofiatus, Sa'adun Akbar, and M. Ramli, "Peran Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan* 1, no. 5 (2016): 984–88

meliputi: (1) kompetensi kognitif (kecakapan ranah cipta); kompetensi afektif (kecakapanranah rasa); kecakapan psikomotor (kecakapan ranahkarsa) ⁶⁵ . Guru berkewajiban mengembangkan tujuan-tujuan pendidikan menjadi renacan-rencana yang oprasional. Tujuantujuan umum perlu diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan spesifik dan oprasional. Dalam perencanaan itu, murid perlu dilibatkan, sehingga relevan dengan perkembangan, kebutuhan, dan tingkat pengalaman mereka.

Guru berkewajiban menyediakan berbagai sumber yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman yang kaya. Sumber pengetahuan itu perlu ditunjukkan, kendatipun pada hakekatnya anak sendiri yang berusaha menemukannya. Oleh karena itu, guru yang profesional merupakan guru yang kompeten dan mampu menjalankan profesinya sebagai pendidik, guru yang profesinal harus terampil dalam tugasnya karena guru menjadi panotan bagi siswa di dalam kelas.

Salah satu teori yang dapat dijadikan landasan terbentuknya kompetensi seseorang adalah teori medan yang dirintis oleh Kurt Lewin. Asal teori medan itu sendiri berangkat dari teori psikologi Gestalt yang dipelopori oleh tiga psikologi Jerman, yakni Max

⁶⁵ Yusutria, “*Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia,*” *Curricula*, 1 (STKIP PGRI Sumatra Barat, 2017), 41-42.

Wertheimer, Kohler, dan Koffka, di mana dalam teori mereka disebutkan bahwa kemampuan seseorang ditentukan oleh medan psikofisis yang terorganisasi yang hampir sama dengan medan gravitasi. Perhatian utama dalam teori ini adalah masalah persepsi, belajar, dan berpikir. Selanjutnya, Kurt Lewin mengembangkan teori ini dengan memosisikan seseorang akan memperoleh kompetensi karena medan gravitasi disekitarnya yang turut membentuk potensi seseorang secara individu. Artinya, kompetensi individu dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungannya yang dalam pandangan teknologi pembelajaran lingkungan tersebut diposisikan sebagai sumber belajar⁶⁶.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (pasal 28 ayat 3) menyebutkan bahwa ada (4) empat kompetensi guru yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi ini harus dimiliki oleh orang yang memegang profesi sebagai guru. Selain itu, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, standar kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku

⁶⁶ Mudlofir, Ali. *Pendidik Profesional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PP 74/2008 meliputi kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogis, kemampuan sosial, kemampuan pribadi, dan kemampuan akademik selaras dengan konsep Islam yang menuntut setiap umat muslim untuk terus menuntut ilmu tanpa mengenal waktu dan usia. Konsep belajar sepanjang hayat dan memperbaiki diri secara terus-menerus merupakan konsep yang dianut dalam Islam. Seorang pendidik dituntut untuk menambah ilmu pengetahuan dan terus berusaha untuk menjadi orang yang lebih berkualitas, baik akhlak maupun pengetahuannya.

Menurut Imam Al-Ghazali, kriteria untuk menjadi seorang pendidik yang islami dan profesional haruslah mempunyai kriteria berikut: 1. Pendidik yang ideal adalah orang tua maupun guru yang mempunyai akal cerdas, akhlak yang sempurna, dan fisik yang kuat. Pendidik harus mempunyai sifat tersebut karena akal yang cerdas dibutuhkan untuk menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam. Kepemilikan akhlak yang sempurna dibutuhkan agar pendidik dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Sementara itu, fisik yang kuat dibutuhkan agar pendidik dapat membimbing peserta

didiknya dengan baik. 2. Pendidik harus mempunyai tanggung jawab besar dalam mengajar, membimbing, dan mengarahkan peserta didik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendidik juga harus membantu peserta didik untuk menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat. 3. Pendidik harus dapat memahami kejiwaan dan kemampuan intelektual peserta didik yang berbeda-beda. Perkembangan psikologi dan intelektual mereka berbeda untuk setiap tingkatan umur. Oleh sebab itu, pendidik juga harus dapat menyajikan materi secara sistematis.

Pendidik harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap peserta didik, serta tidak boleh menggunakan makian dan kekerasan. Guru yang baik pada umumnya menganggap peserta didik seperti anaknya sendiri. Kewajiban menyampaikan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban seorang muslim. Jadi, seorang pendidik harus mempunyai sifat ikhlas dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan tidak boleh mengharapkan imbalan. Pendidik yang ideal dapat memahami perbedaan potensi setiap peserta didik dan memaklumi kekurangan mereka. Oleh sebab itu, guru perlu memperlakukan peserta didik sesuai dengan potensi mereka. Pendidik juga perlu memahami tabiat, bakat, dan kemampuan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka.

C. Perencanaan Pengembangan Kompetensi Guru

Pada hakikatnya perencanaan sumber daya manusia ialah suatu proses yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lainnya dengan baik⁶⁷. Menurut Suparno Eko Widodo perencanaan sumber daya manusia ialah suatu proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, agar organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuan organisasi⁶⁸. Menurut Malayu, S.P. Hasibuan perencanaan sumber daya manusia ialah suatu kegiatan merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan⁶⁹.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia ialah serangkaian kegiatan menganalisis dan mengidentifikasi permintaan kebutuhan tenaga kerja

⁶⁷ Miner, John B; & Mary Green Miner, *Personel and Industrial Relation (A Managerial Approach)*, 2th Edition, (New York: The Macmillan Company, 1995) hlm 18.

⁶⁸ Suparno Eko Widodo, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 33

⁶⁹ Malayu, S.P. Hasibuan, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016) hlm 250

di masa yang akan datang dalam suatu lembaga /instansi secara sistematis dan strategis agar memperoleh sumber informasi yang tepat guna menyediakan guru dalam jumlah dan kualitas sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi secara benar dan tepat guna mencapai tujuan organisasi.

Fungsi perencanaan SDM ialah memformulasikan dan mengintegrasikan rencana SDM dengan rencana suatu lembaga atau instansi, mengkaji faktor sosial, teknologi dan yang lainnya, sehingga mempunyai dampak terhadap pekerjaan dan individu terhadap kebutuhan dan ketersediaan SDM bagi lembaga pendidikan, membuat prediksi SDM, mendukung kegiatan pengadaan, alokasi, kompetensi dan pengembangan SDM, serta mengkaji nilai-nilai penggunaan SDM.

Proses perencanaan sumber daya manusia diawali dengan memahami terlebih dahulu visi, misi, tujuan, strategi dan struktur dari organisasi pendidikan serta mengkaji keadaan SDM yang ada saat ini baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian menghitung kebutuhan SDM yang ingin dicapai yang sesuai dengan rencana strategi organisasi. Selanjutnya mempelajari terlebih dahulu berapa besar perbedaan antara keadaan SDM saat ini dengan kebutuhan SDM yang

ingin dicapai dengan memperhitungkan penyusutan dari SDM yang ada.

Pembuatan program pengembangan haruslah dipenuhi diantaranya yaitu: menentukan kebutuhan, menentukan tujuan, menentukan isi program, mengidentifikasi prinsip-prinsip belajar, melaksanakan program, penilaian hasil program. Sebagaimana pernyataan diatas bisa diketahui beberapa tahapan dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai berikut: Analisis kebutuhan, sekolah menyesuaikan kebutuhan sekolah berdasarkan pada keputusan hasil analisis kebutuhan yang sudah ditentukan. Tujuan pelatihan dan pengembangan. Isi program pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan. Prinsip pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan dan isi program.

Tujuan dari tahapan penentuan kebutuhan dalam pelatihan dan pengembangan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang relevan agar mengerti dan menentukan apakah perlu atau tidaknya pelatihan dalam sekolah. Berikut menurut Patricia Paton dalam Ahmad ada beberapa tingkatan dalam pengembangan pendidik sebagai berikut⁷⁰: 1.) Bekal awal peningkatan kemampuan guru ialah persiapan

⁷⁰ Ahmad Susanto, *Konsep Strategi dan Implementasi Manajemen*

terutama yang harus dilaksanakan oleh pimpinan sekolah secara masak, karena akan memberi pengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Beberapa hal yang harus disiapkan ialah kesiapan komponen, baik material maupun sumber daya manusia yang berkaitan dengan program pengembangan. 2.) Pemberian kepercayaan kepada guru. Ciri yang penting dari pengembangan guru ialah otonomi yang diberikan kepada tenaga pendidik, dimana pendidik dianggap mumpuni untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Guru wajib dilibatkan dalam setiap kegiatan dan diberikan kesempatan untuk memberikan aspirasinya. Tujuan dari pemberian kepercayaan guru ialah agar guru merasa lebih percaya diri dan lebih bebas untuk mengoptimalkan kemampuan tugas dan tanggungjawabnya.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi Profesional guru yaitu memilih program pengembangan kompetensi profesional guru sesuai dengan kebutuhan, bisa menggantikan program yang sudah terlaksana atau menambah program yang lain. Program tersebut diantaranya: penataran-penataran, workshop, Pelatihan, MGMP, dan lain-lain. Merencanakan alokasi anggaran biaya khususnya dalam pengembangan

kompetensi guru setiap tahunnya dengan menggunakan prinsip efektif dan efisien, karena anggaran program tersebut sangat terbatas⁷¹.

Mengadakan pemetaan bagi guru yang belum pernah mengikuti pengembangan dan yang sangat memerlukan pengembangan kompetensi profesional guru akan dilakukan pemetaan dan selanjutnya dari hasil pemetaan itu disosialisasikan kepada guru melalui rapat pertemuan sosialisasi pengembangan kompetensi profesional guru. Melalui pertemuan ini diharapkan kepada semua guru selalu mempersiapkan diri terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi profesional guru yang akan dilaksanakan melalui internal dan eksternal sekolah bekerja sama dengan instansi terkait, melalui internal sekolah kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Supervisi oleh kepala sekolah dan dibantu oleh petugas lain yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Melalui eksternal sekolah yang akan dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Kabupaten/Kota maupun Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Provinsi.

D. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pengertian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ialah kegiatan pembelajaran dan pengembangan yang dilakukan secara

⁷¹ Sudarman, M. *Profesi Guru, Dipuji, Dikritis, dan Dicaci*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).2013.h.23

bertahap dan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan kebutuhan⁷². Pengembangan keprofesian berkelanjutan berdasarkan permennag PAN dan RB No.16 Tahun 2009, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya⁷³.

Menurut Baedhowi *Continuing Profesional Development* (CPD) merupakan konsep upaya peningkatan kualitas keterampilan dan pengetahuan profesional dari standar yang telah ditetapkan⁷⁴. Hal ini menuntut guru untuk aktif dan kreatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. PKB dalam buku pedoman PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan alat utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Dengan demikian pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan langkah awal peningkatan kualitas

⁷² Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan

⁷³ Nanang Priatna, *Pengembangan Profesi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 191.

⁷⁴ Huznul Hatimah dan Andi Nurochmah, Peran Kepala Sekolah sebagai Inovator dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) kepada Guru di SMA Negeri, *Jurnal Administrasi, Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan*, (Vol. 1 No. 2), 2020, hlm. 190

pendidikan melalui pengembangan profesi guru. Sehingga guru mampu meningkatkan memelihara serta menambah keterampilan dan pengetahuan untuk membangun kualitas pribadi yang diperlukan dalam kehidupan profesionalnya.

Berdasarkan pengertian diatas, guru dapat memelihara, meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan ketrampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta didik.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ditujukan untuk mendorong guru dalam memelihara dan meningkatkan standar mereka secara keseluruhan dan mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai sebuah profesi. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, karakteristik dan keterampilan pada guru⁷⁵. Merujuk pada penjelasan ini, maka PKB sudah semestinya dilaksanakan oleh civitas akademik demi terwujudnya visi misi

⁷⁵ Nanang Priatna, *Pengembangan Profesi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 191

pendidikan, khususnya dalam mengukur atau memantau kompetensi guru dalam mengajar dan mendidik.

Dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan terdapat cakupan yang harus diperhatikan. Sebagaimana pedoman untuk pengelolaan PKB, cakupan tersebut tertera pada siklus PKB yaitu perencanaan, implementasi, evaluasi, dan refleksi. Siklus tersebut lebih jelas ditampilkan pada diagram berikut ini. (diadopsi dari *Center for Continuous Professional Development (CPD), University of Cincinnati Academic Health Center*). Melalui siklus perencanaan, implementasi, evaluasi, dan refleksi kegiatan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, makdiharapkan guru akan mampu mempercepat pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian untuk kemajuan karirnya⁷⁶. Berikut penjelasan keempat prosedur PKB:

1) Perencanaan PKB

Perencanaan PKB merupakan kegiatan secara sistematis untuk menyusun rangkaian kegiatan. Perencanaan PKB dilakukan oleh guru bersama koordinator PKB untuk satu tahun yaitu pada dua semester.

⁷⁶ Kemdikbud Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan Mutu Pendidikan Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan,....hlm. 6.

Perencanaan tersebut bertolak atau berlandaskan kepada hasil evaluasi. Perencanaan dibuat sesuai keadaan dan kebutuhan guru. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa perencanaan hendaklah riil, konkrit, dan dapat dilaksanakan. Dan juga perencanaan tersebut harus disahkan oleh kepala sekolah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

2) Implementasi PKB

Implementasi PKB merupakan kegiatan PKB yang dilaksanakan secara substansial yang mengacu pada hasil perencanaan. Kegiatan ini juga harus dilengkapi dengan administrasi kegiatan. Kelengkapan administrasi kegiatan misalnya catatan kehadiran, produk yang dihasilkan, topik yang dibahas, narasumber atau fasilitator yang berperan. Intinya adalah mencatat apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dicatat. Kelengkapan administrasi tersebut sangat diperlukan karena akan berfungsi sebagai bukti fisik bahwa kegiatan telah dilakukan.

Implementasi PKB, monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh coordinator PKB atau petugas yang ditunjuk untuk itu. Monev ini diperlukan untuk melihat dan mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan PKB. Dari hasil monev itu akan tergambar keberhasilan, hambatan, dan tantangan dalam pelaksanaan PKB sesuai

perencanaan yang dibuat. Hasil monev ini nanti akan menjadi bahan dan dasar untuk melakukan kegiatan refleksi.

3) Evaluasi PKB

Evaluasi diri merupakan dasar bagi guru untuk menyusun rencana kegiatan PKB yang akan dilakukan oleh guru. Dalam mengevaluasi diri terdapat dua kegiatan utama. Kedua kegiatan utama itu adalah Evaluasi Diri Guru (EDG) yang dilakukan secara mandiri dan Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang dilakukan oleh penilai eksternal yang ditunjuk dan ditetapkan untuk itu. Dari hasil penilaian internal dan eksternal itu akan diperoleh gambaran tentang kompetensi guru. Dari gambaran itu akan terlihat hal yang harus diperbaiki dan hal yang harus ditingkatkan pengembangan.

4) Refleksi

Merefleksi artinya melihat kembali hal-hal yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan PKB ini sejak awal dilihat kembali, hal yang dilihat adalah menyangkut dengan proses dan hasil. Dalam refleksi ini akan terhimpun data dan tercatat informasi tentang pelaksanaan PKB. Data dan informasi itu bersifat netral dan objektif. Belum ada intervensi terhadapnya. Guru yang bersangkutan melakukan kegiatan refleksi ini

apakah kegiatan PKB yang diikutinya benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan kompetensinya⁷⁷.

Kegiatan PKB tidak terlepas dari peran koordinator PKB. Koordinator tersebut memiliki tanggung jawab mengelola kegiatan PKB. Koordinator PKB adalah guru yang bertugas mengkoordinasi pelaksanaan PKB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi kegiatan, hingga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan PKB di sekolah/madrasah.

Koordinator PKB tingkat sekolah dapat dijabat oleh Kepala sekolah langsung atau wakil atau guru yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah untuk melaksanakan tugas tersebut. Selain itu, sekolah dan dinas pendidikan setempat harus menjamin keterlaksanaan tugas koordinator PKB tingkat sekolah, tujuannya agar pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip PKB dan sekaligus dapat mencapai tujuan PKB, yaitu dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik.

Model Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan mencakup tiga hal; yakni pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif⁷⁸.

⁷⁷ Nanang Priatna, *Pengembangan Profesi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 191

1) Pengembangan Diri

Pengembangan diri merupakan usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan serta kemampuan bagi masing-masing individu. Menurut Abraham Maslow pengembangan diri adalah usaha individu dalam mengaktualisasikan diri sesuai kebutuhannya. Kemudian menurut Mc Clelland pengembangan diri dikategorikan dalam usaha pemenuhan kebutuhan untuk prestasi. Dengan demikian pengembangan diri merupakan upaya seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan kemauan sesuai kebutuhan untuk prestasi.

Pengembangan diri dalam program PKB terdiri atas Pendidikan dan Pelatihan (diklat) fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesionalan guru yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sesuai MA No. 38 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 2 menyatakan bahwa pengembangan diri yang dimaksud meliputi pendidikan dan pelatihan fungsional serta kegiatan pengembangan lainnya yang dilakukan oleh guru, forum kerja guru atau asosiasi/organisasi profesi guru.

⁷⁸ Kementerian Pendidikan Nasional, *Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru: Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan*, (2010), hlm. 8

Dalam sistem penilaian kinerja guru, terdapat beberapa pola pendidikan dan latihan (diklat) fungsional yang dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan guru (PKB Guru). Diklat tersebut bertujuan antara lain untuk memperbaiki kompetensi dan/atau kinerja guru di bawah standar, memelihara/meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan/atau kinerja guru standar/di atas standar, serta sebagai bentuk aktifitas untuk memenuhi angka kredit kenaikan pangkat/jabatan fungsional dan pengembangan karir guru⁷⁹.

Kegiatan Kolektif Guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesian guru yang bersangkutan. Kegiatan kolektif guru dapat berupa Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti KKG, MGMP, MGBK, KKKS dan MKKS) untuk menyusun dan/atau mengembangkan perangkat kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan/atau media pembelajaran.

⁷⁹ Nanang Priatna, *Pengembangan Profesi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 191

2) Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah ini mencakup pembuatan: Karya tulis berupa laporan penelitian pada bidang pendidikan yang Diterbitkan dalam bentuk buku yang ber-ISBN serta diedarkan secara nasional. Diterbitkan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Diseminarkan di sekolah atau disimpan di perpustakaan. Tulisan ilmiah bidang pendidikan dan pembelajaran yang dimuat di Jurnal tingkat nasional terakreditasi; Jurnal tingkat nasional yang tidak terakreditasi/tingkat provinsi; Jurnal tingkat lokal (kabupaten/kota/madrasah/sekolah).

3) Karya Inovatif

Karya inovatif merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk peranan guru dalam upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.

Karya inovatif ini dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni, pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, atau penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat

nasional maupun provinsi⁸⁰. Kegiatan PKB yang berupa karya inovatif, terdiri dari 4 kelompok, yaitu: pertama: menemukan teknologi tepat guna, kedua: menemukan/ menciptakan karya seni, ketiga: membuat/modifikasi alat pelajaran/ peraga/ praktikum, keempat: mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya.

Merencanakan suatu program khususnya dalam pengembangan kompetensi profesionali yaitu melakukan analisis dari program-program yang telah dijalankan baik dari segi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran. Maka akan diperoleh rancangan yang akan dilaksanakan kedepan baik akan meneruskan program yang telah berjalan, maupun melaksanakan program baru yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pengembangan kompetensi profesional guru tersebut, serta mengalokasikan anggaran khusus dalam pengembangan profesional guru.

Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi profesional guru yakni dengan memberikan fasilitas yang memadai bagi guru seperti media pembelajaran yang lengkap dan media informasi sarana

⁸⁰ Kementerian Pendidikan Nasional, Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru: Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, (2010), hlm. 8

guru mencari informasi dalam peningkatan kemampuannya dalam mengajar dan lainnya. Kemudian madrasah melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi guru sesuai kebutuhan dalam hal pembelajaran, teknologi informasi, seperti penataran metode pembelajaran, penataran karya tulis ilmiah, sertifikasi profesi/kompetensi, program supervisi kepala madrasah, program pemberdayaan MGMP, dan pengembangan yang dilakukan oleh guru sendiri.

Implementasi kemampuan profesional guru mutlak diperlukan sejalan diberlakukannya otonomi daerah, khususnya bidang pendidikan Kemampuan profesional guru akan terwujud apabila guru memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam mengelola interaksi belajar-mengajar pada tataran mikro, dan memiliki kontribusi terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan pada tataran makro.

Program pendidikan baru yang inovatif diberlakukan oleh pemerintah dalam waktu paling tidak lima tahun terakhir ini, seperti *broad based education*, *life skills*, manajemen pendidikan berbasis sekolah, *contextual teaching learning* (CTL), evaluasi belajar model portofolio, dan yang terakhir Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Semua itu kurang atau bahkan tidak mengikutsertakan guru sebagai variabel penting dalam pelaksanaan program-program itu, padahal

semua program baru itu bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Dengan banyaknya program baru itu, semestinya para guru didorong untuk memiliki profesionalisme yang lebih tinggi⁸¹.

Upaya pengembangan profesionalitas guru selain dari PKB yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Program guru Penggerak. Permendikbud no 87 tahun 2013 mengemukakan bahwa program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/ D IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. tujuan Program PPG adalah (a). untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; (b). Menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan (c). mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Sementara itu, Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki

⁸¹ Yusutria, "*Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*," *Curricula*, 1 (STKIP PGRI Sumatra Barat, 2017), 41-42.

lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri⁸².

Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud menyusun program guru penggerak yang terintegrasi dengan kurikulum merdeka belajar yang bertujuan untuk mereformasi mutu pendidikan. Kebijakan dan program tersebut untuk mereformasi pendidikan tidak hanya dalam aspek pendekatan administrasi, namun juga untuk transformasi nilai-nilai budaya dengan konsep *culture of learning innovation* dengan memanfaatkan berbagai kondisi lingkungan sekolah sesuai dengan kultur yang berkembang. Guru penggerak adalah guru yang mampu berinovasi sehingga mampu memberikan inspirasi tidak hanya bagi siswa namun juga bagi masyarakat luas. Dengan sifatnya yang membangun keterampilan, potensi dan kompetensi diri, guru penggerak mampu menjadi pioneer untuk guru lainnya agar bisa terus bersemangat dalam mengembangkan skill pedagoginya ditengah perkembangan zaman atau pembelajaran abad-21 ini. Program guru penggerak mengembangkan skill untuk pedagogi yang dibutuhkan, guru penggerak juga diarahkan pada kemampuan manajerial untuk dapat menjadi leader, baik itu kepala sekolah, pengawas maupun leader

⁸² Anik Gufon. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Profesi Guru.*(Yogyakarta: UNY Press,2010)

di dalam kelas itu sendiri⁸³. Guru penggerak menjadi salah satu prasyarat bagi pengawas atau kepala sekolah yang memiliki kompetensi unggul sehingga kedepannya terlahir generasi penggerak yang dapat menjadi leader dalam proses perubahan ke arah yang lebih baik lagi sehingga kualitas pendidikan lebih meningkat.

Program guru penggerak ini untuk menstimulus potensi guru agar lebih berkembang merujuk pada nilai-nilai pancasila agar bisa mengimplementasikan nilai pancasila kepada para pelajar secara integratif dengan berbagai bidang studi yang ada. Guru penggerak sebagai roda perubahan pendidikan ke arah yang lebih maju dengan mengubah paradigma pendidikan yang berpusat pada siswa dan mengkonstruksi ekosistem serta model pendidikan yang unggul⁸⁴.

E. Pendidikan Agama Islam

Pengajaran dapat dikatakan sebagai suatu proses transfer ilmu belaka, namun pendidikan merupakan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Perbedaan pendidikan dengan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian anak

⁸³ Satriawan, W., Santika, I. D., Naim, A., Tarbiyah, F., Raya, B., Selatan, L., Timur, L., Bakoman, A., & Panggung, P. Guru Penggerak Dan Transformasi Sekolah. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*. 11 (1), 1–12.2021

⁸⁴ Hendri, N. Merdeka Belajar; Antara Retorika dan Aplikasi. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 8(1),2020

didik di samping transfer ilmu dan keahlian.⁸⁵

Pendidikan secara umum memuat sebuah usaha dan cara-cara yang dipersiapkan oleh pelaku pendidikan dengan persiapan yang matang dan penekanan-penekanan menuju ke arah proses transformasi nilai dan pembentukan kepribadian yang sesungguhnya tidak mudah dilaksanakan. Jika kemudian dihubungkan dengan Islam sebagai sistem keagamaan kata pendidikan menimbulkan pengertian-pengertian baru dengan penekanan dan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan cara pandang yang digunakan oleh para ahli.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan agama merupakan suatu usaha yang secara sadar dilakukan. guru untuk mempengaruhi siswa dalam rangka pembentukan manusia beragama.⁸⁶

⁸⁵ Ricci, C., & Pritscher, C. P. The path towards democracy: Holistik education and critical pedagogy. *Holistik Pedagogy*, 1,121-127.2015.

⁸⁶Latifah. Peran Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 20, No. 1 (2020), pp. 173-197 DOI: 10.20885/millah.vol20.iss1.art7 Millah Vol. 20, No. 1 Agustus 2020 | 173.2020

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Oleh sebab itu, dibutuhkan berbagai usaha dan ikhtiar yang sistematis dan sinergis dari berbagai pihak. Masing-masing pihak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kemampuan dan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki.

Setiap orang tua dapat mengajarkan dan mendidik anaknya di rumah, masyarakat bisa menyediakan berbagai sarana dan prasarana pengamalan ibadah sebagai bentuk pendidikan praktis kepada anak didik.⁸⁷ Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dituntut untuk membuat berbagai regulasi dan kebijakan yang kondusif bagi peserta didik dan masyarakat untuk mendalami dan mempelajari serta mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.⁸⁸

Pendidikan Islam dipandang sebagai sebuah usaha dan cara kerja yang memiliki tiga karakter, yaitu: Pertama, pendidikan Islam memiliki karakter penekanan pada pencarian dan penguasaan ilmu pengetahuan. Kedua, pendidikan Islam merupakan sebuah pengakuan akan potensi

⁸⁷Alfauzan Amin, Alimni Alimni, Rahmat Perdana, Miftahul Zannah Azzahra, Sabila Eka Septi, Associative and Comparative Study on Students' Perseverance and Religious in Islamic Education Subject, *Jurnal Pendidikan Progresif*, 2021, h. 11

⁸⁸Hayadin 'Layanan Pendidikan Agama Sesuai Agama Siswa di Sekolah', *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 1(1). doi: 10.32729/edukasi 2017 v 1 62

dan kemampuan seseorang untuk berkembang. Ketiga, pendidikan Islam merupakan sebuah pengalaman ilmu atas dasar tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa.⁸⁹ Dengan demikian pendidikan Islam sebagai sebuah usaha manusia karena terjalin dalam rangka hubungan antara manusia sekaligus bernilai ibadah kepada Tuhan.

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah bagian integral daripada pendidikan nasional sebagai suatu keseluruhan. Dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat 1 dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat antara lain pendidikan agama. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Ada beberapa prinsip dasar dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum PAI⁹⁰ yaitu: Penataan kembali distribusi materi yang tumpang tindih antar jenjang dan antar kelas, Perumusan level kompetensi yang ditingkatkan untuk membekali peserta didik

⁸⁹Apduludin & Martinisyamin. Modeling Analysis, Findings, Development, Organizing the Material and Learning for Students in Islamic Boarding Schools. *Jurnal Pendidikan Islam*, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 25-36, June 2022

⁹⁰Amir. Curriculum Management In Improving Competitive Advantage in Madrasah. *Managere: Indonesian Journal of Educational Management*, 3(2), 2021.53-61

lebih tinggi dalam berfikir kritis dan inovatif. Sehingga level kompetensi MI ditingkatkan hampir 30 % Kompetensi Dasar (KD) berlevel C4, MTs 70 % dan MA 90% level C4 hingga C6.

Penataan kesinambungan dan keselarasan perumusan antara KD1 Sikap spiritual, KD 2 Sikap Sosial, KD 3 Pengetahuan dan KD 4 Keterampilan. Penguatan Mata Pelajaran PAI pada aspek sikap dan keterampilan beragama dibanding pengetahuan atau kognitif. Penguatan Mata Pelajaran PAI untuk menghasilkan keyakinan dan penghargaan siswa dalam membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat relevan dengan kemajuan zaman. Harapannya dalam pengembangan kurikulum PAI adalah siswa semakin memahami ajaran agama dan bisa menjadi bekal menjadi warga bangsa yang bisa hidup dalam keberagaman dan tetap kompetitif dalam kemajuan zaman⁹¹.

Undang – undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat Pendidikan Agama, dan merupakan mata pelajaran wajib. Tujuan pendidikan nasional berusaha untuk mewujudkan manusia Indonesia yang religius/beragama, bangsa yang dapat menghargai warga

⁹¹ Azyumardi Azra. *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, cet. 2. (Jakarta: Kencana,). H. 43.2014

negaranya dan identitas kebangsaan dengan bahasa nasionalnya.

Berbagai krisis multi dimensional yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia memang tidak hanya bisa dilihat dan diatasi dengan pendekatan mono dimensional. Namun demikian karena pangkal dari krisis tersebut adalah rendahnya moral, akhlak manusia maka, pendidikan agama memiliki andil yang sangat besar dalam membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk itu diperlukan pembelajaran pendidikan agama Islam yang efektif, sehingga keberhasilan penyelenggaraan pendidikan agama berkontribusi terhadap penyiapan generasi yang memiliki etika, moral, dan perilaku yang baik.⁹²

Pada umumnya praktek penyelenggaraan pendidikan dalam suatu masyarakat dilatarbelakangi oleh pertimbangan subyektif. Misalnya preferensi nilai serta prinsip yang dipilih. Aneka pertimbangan subyektif tersebut sebenarnya bisa dimengerti, mengingat praktek pendidikan merupakan bagian dari bentuk aktualisasi atas motivasi dan orientasi masyarakat. Dengan merunut pada pertimbangan motivasi dan orientasi masyarakat atau cita-cita sosial di atas, maka praktek penyelenggaraan pendidikan baik di

⁹² Maksudin, *Pengembangan Metodologi Pendidikan Agama Islam Pendekatan Dielektik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) h.8.2015

sekolah maupun luar sekolah mempunyai peran penting yang berbeda.

Satu sisi, proses pendidikan dapat melegitimasi terhadap formasi sosial budaya yang ada (*status quo*), sisi yang lain pendidikan berperan membangun atau merubah tatanan sosial budaya menuju yang lebih adil. Perbedaan arah penyelenggaraan pendidikan disebabkan oleh perbedaan ideologinya. Ideologi berupaya menggambarkan mengenai karakteristik umum tentang alam dan masyarakat, serta menjadipanduan perilaku yang bersifat evaluatif.⁹³

Pendidikan Agama Islam adalah sebuah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah atau madrasah, baik dari mulai pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi, sebagai upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran-ajaran agama Islam, dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.

Pendidikan agama Islam merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan

⁹³ William F O'Neill. *Ideologi-ideologi pendidikan*, terjemahan Omi Intan Naomi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)..h. 36

memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

Menurut GBPP PAI di sekolah umum pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam menyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional⁹⁴.

Karakteristik pembelajaran pendidikan agama Islam idealnya sesuai dengan konsep holistik, jika dibandingkan dengan pemikiran pendidikan Barat yang cenderung sekuler dan materialistik, akibat pemisahan agama dan ilmu, sistem pendidikan agama Islam memiliki karakteristik yang perlu dijadikan sebagai visi, misi, orientasi dan aktualisasi pengembangan sistem pendidikan Islam.

Karakteristik yang dimaksud yaitu: Pertama, Pendidikan Agama Islam bersifat rabbani bersumber dari dan bermuara kepada sistem nilai ketuhanan, sumber utamanya adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan As-

⁹⁴ Deny Harianto dan Nanik Rubiyanto, *Strategi Pembelajaran Holistik Integratif di Sekolah*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 4.

Sunah. sistem Pendidikan Agama Islam juga berorientasi kepada nilai-nilai transendental dan spiritual, tidak hanya berupa mewujudkan kebahagiaan duniawi tetapi juga mewujudkan kebahagiaan ukrawi. Jadi Pendidikan Agama Islam itu berbasis tauhid, akidah yang benar dan lurus, dan spirit ibadah yang ikhlas karena Allah semata ⁹⁵.

Kedua, Pendidikan Agama Islam bersifat berwawasan kemanusiaan dan humanistik, produk Pendidikan Agama Islam hendaknya berorientasi kepada proses humanisasi, pemanusiaan manusia dengan mengedepankan pencerahan, pemberdayaan, pencerdasan, kemaslahatan dan kesejateraan umat manusia. Karena itu Pendidikan Agama Islam memprioritaskan pemberlakuan nilai-nilai moral yang luhur dalam berinteraksi dengan kitab suci maupun dalam mengembangkan wacana keilmuan.

Sistem Pendidikan Agama Islam tidak berwujud teori-teori yang tidak membumi melainkan seharusnya mewujudkan sistem sosial, ekonomi, politik, budaya dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih beradab, adil dan sejahtera dengan kata lain Pendidikan Agama Islam harus mampu melayani kepentingan dan kemaslahatan manusia sesuai dengan norma-norma dan nilai nilai yang berakhlak mulia.

⁹⁵ Chuzaimah Batubara, dkk, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 5.

Ketiga, Pendidikan Agama Islam bersifat komprehensif dan integratif yang meliputi segala bidang keilmuan, ketrampilan (bahasa, sosial, hidup) berorientasi dunia dan akhirat. Pendidikan Agama Islam tidak hanya mengkaji masalah metafisika seperti yang digeluti oleh filosof dan teolog tetapi juga mencakup seluruh bidang dan aspek kehidupan manusia.

Keempat, Pendidikan Agama Islam itu bercita-cita dan bertujuan mulia. Pendidikan Agama Islam tidak menganut paham pemikiran untuk pemikiran, ilmu untuk ilmu, atau seni untuk seni tetapi Pendidikan Agama Islam dikembangkan untuk merealisasikan cita-cita mulia dan luhur yaitu: membangun peradaban dimuka bumi. Kelima Pendidikan Agama Islam memiliki karakteristik kejelasan, tidak hanya dari segi sumber acuan dan metodenya tetapi juga jelas dari segi orientasi, kerangka berikut prosedur kerja dan implementasinya.

Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan seraf menjadikan Islam sebagai pandangan hidup⁹⁶. Guru pendidikan agama Islam adalah sebuah usaha berupa bimbingan dan

⁹⁶ Muh Hambali, *Manajemen Pengembangan Etika Profesi Guru* (Cet. I; Yogyakarta: Diva Press, 2019), 39-40.

usaha terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikan dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud apa tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhiratnya kelak. Guru pendidikan agama Islam mempunyai tanggung jawab profesi untuk mengajar, membimbing dan mengasuh terhadap anak didik agar dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan tujuannya.

Guru pendidikan Islam dituntut untuk komitmen terhadap profesionalitas dalam mengemban tugasnya, sehingga dalam dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap mutu proses dan hasil kerja serta sikap continuous improvement, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntunan zamannya, yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi.

Terdapat beberapa kemampuan dan perilaku yang perlu di miliki oleh guru yang sekaligus merupakan profil guru pendidikan agama Islam yang di harapkan agar dapat menjalankan tugas-tugas ke

pendidikan dapat berhasil secara optimal. Menurut Al-Ghazali dalam Siswanto kompetensi profesional yang harus di miliki oleh GPAI mencakup: a) menyajikan pelajaran dengan taraf kemampuan peserta didik., b) peserta didik yang kurang mampu, sebaiknya diberi ilmu-ilmu yang global dan tidak detail⁹⁷.

Guru Pendidikan Agama Islam sebagai guru mata pelajaran mempunyai peran yang sama, apabila dibandingkan dengan guru mata pelajaran lain. Peran dan tanggung jawab semua guru yaitu mendidik moral peserta didik, apalagi dalam menumbuhkan karkater anti korupsi karena korupsi merupakan musuh setiap individu dalam menegakkan hukum yang ada. Peran guru tersebut seperti memberi informasi, memberikan nasihat, motivasi dan sebagai teladan.

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Guru yang profesional diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Profesionalisme guru sebagai ujung tombak di dalam implimentasi kurikulum di kelas yang perlu mendapatkan perhatian.⁶⁶ Begitu banyak peranan guru sebagai seorang pendidik dalam karangka peningkatan kualitas pendidikan yang tentunya sangat di tentukan oleh kualitas guru itu sendiri. Menurut

⁹⁷ Nidhaul Khusna, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Karakter Anti Korupsi," *Kajian Pendidikan Islam*, 2 (Desember, 2016), 179.

Denda Suroto Prawiroatmojo dalam Supardi, terselenggaranya pendidikan yang bermutu, sangat di tentukan oleh guru-guru yang bermutu pula, yaitu guru yang dapat menyelenggarakan tugas-tugas secara memadai.

F. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Muhammad Fadhil al-Jamali merumuskan tujuan pendidikan Islam dengan empat kategori: (1) memperkenalkan manusia pada tempatnya di antara sesama makhluk dan tanggung jawabnya dalam kehidupan ini (2) memperkenalkan manusia pada interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam kehidupan sosial; (3) untuk memperkenalkan manusia pada alam dan mengajak mereka untuk mengenali kearifan kreatifnya dan memungkinkan mereka untuk mengambil manfaat darinya; dan (4) membimbing manusia kepada Pencipta ciptaan (Allah) dan memerintahkan mereka untuk menyembah-Nya⁹⁸. Dengan demikian tujuan pendidikan Islam yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT dan menjalankan tanggung jawabnya serta bersosial dengan masyarakat.

Pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan

⁹⁸ Muhammad Munif, "Pengembangan Pendidikan Agama Islam Sebagai Budaya Sekolah," *Pedagogik: Jurnal Pendidikan* 3, no. 2 (2016): 46–57.

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan agama Islam juga berperan dalam mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam yang menghibur dan menjamin semangat pengharapan, menebarkan semangat ketakutan atau bahkan keputusasaan. Hal ini dikarenakan nilai-nilai pendidikan Islam yang menjanjikan ketenangan dan ketentraman, pendidikan agama Islam juga berperan penting dalam mencegah konflik yang terjadi di masyarakat, khususnya konflik antar umat Islam itu sendiri⁹⁹.

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME serta berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dibutuhkan pendidik yang

⁹⁹ Hisyam Muhammad Fiqy Aladdiin Aladdiin and Alaika M. Bagus Kurnia PS, "Peran Materi Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dalam Membentuk Karakter Kebangsaan," *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 10, no. 2 (2019): 153–73

profesional.

Tujuan utama pembelajaran mata pelajaran agama Islam adalah pengembangan kepribadian pada diri siswa yang tercermin dalam tindakan dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pengajaran mata pelajaran agama Islam bukan hanya menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran agama Islam saja, tetapi bantuannya dibutuhkan oleh setiap orang, di komunitas, sekolah, komunitas, dan yang paling penting orang tua. Sekolah harus mampu mengelola dan memperluas metode pengajaran mata pelajaran agama Islam ke beberapa kelompok yang disebut sebagai komunitas yang saling mendukung dan peduli untuk membentuk siswa yang bermoral dan beretika.

Pendidikan agama Islam adalah kegiatan perbuatan atau usaha bimbingan yang dilakukan secara sadar dan terencana serta terencana yang menghasilkan pembentukan kepribadian peserta didik sesuai dengan standar yang ditentukan oleh ajaran agama¹⁰⁰. Praktisi studi agama Islam juga harus terus berusaha menggali dan mengembangkan ilmu ini secara lebih maksimal sehingga tujuan hak asasi manusia yang kodrati dapat terpenuhi meskipun semakin sulit lebih memilih yang

¹⁰⁰ A Rusdiana, "Integrasi Pendidikan Agama Islam Dengan Sains Dan Teknologi," UIN Maulana Malik Ibrahim VIII, no. 2 (2014): 1–15.

berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Menurut beberapa ulama bahwa ada beberapa kemampuan dan perilaku yang perlu dimiliki oleh guru yang sekaligus merupakan profil guru pendidikan agama Islam (GPAI) yang diharapkan agar dapat menjalankan tugas-tugas kependidikan dapat berhasil secara optimal. Menurut Al-Ghazali dalam Siswanto kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh GPAI mencakup: a) menyajikan pelajaran dengan taraf kemampuan peserta didik, b) peserta didik yang kurang mampu, sebaiknya diberi ilmu-ilmu yang global dan tidak detail¹⁰¹.

Peran guru Pendidikan Agama Islam sebagai guru mata pelajaran mempunyai peran yang sama, apabila dibandingkan dengan guru mata pelajaran lain. Peran dan tanggung jawab semua guru yaitu mendidik moral peserta didik, apalagi dalam menumbuhkan karakter anti korupsi karena korupsi merupakan musuh setiap individu dalam menegakkan hukum yang ada. Peran guru tersebut seperti memberi informasi, memberikan nasihat, motivasi dan sebagai teladan atau role model.

Ruang lingkup pendidikan agama Islam adalah keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dengan Allah SWT,

¹⁰¹ Nidhaul Khusna, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Karakter Anti Korupsi," *Kajian Pendidikan Islam*, 2 (Desember, 2016), 179.

antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta antara manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. Luasnya kajian agama Islam juga terkait dengan beberapa aspek pendidikan agama Islam karena unsur-unsurnya merupakan perpaduan yang tumpang tindih. Dari segi pembahasan, ruang lingkup pendidikan agama Islam yang ditawarkan di sekolah-sekolah antara lain seperti tauhid/iman, hukum, Al Quran, hadits, dan akhlak. Dengan demikian, guru memegang peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar, dimana guru harus mampu mengajar secara efektif, yaitu siswa dilibatkan dalam berbagai kegiatan pembelajaran dan telah terbukti meningkatkan partisipasi otak siswa dalam proses belajar mengajar, kesejahteraan emosional, intelektual dan intelektual siswa¹⁰².

Secara umum tugas pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ketahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Sementara fungsinya adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan berjalan dengan lancar. Saat tugas pendidikan semakin berat pendidikan hanya memanusiaikan manusia

¹⁰² Sopian Sinaga, "Problematika Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Solusinya," *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2017): 14,

semata melainkan pendidikan harus dapat membina siswa sesuai dengan ajaran-ajaran agama, peran serta guru dalam mewujudkan hal tersebut sangatlah penting guru yang merupakan orang pertama di sekolah dalam memberikan ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) menjadi aktor penting bagi siswa karena guru adalah orang yang banyak melakukan interaksi dengan siswa, sehingga guru dapat mendidik, membimbing, mengarahkan, serta memberikan pelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan ajaran agama Islam.

G. Pengembangan Kurikulum PAI

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Bab X pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Pengembangan kurikulum PAI sama saja dengan kegiatan menghasilkankurikulum PAI yang baru ¹⁰³ . Pada pengembangan ini terdapat proses yang saling berkaitan antara

¹⁰³ Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 183-184.

satu komponen dengan komponen yang lain untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik dan berkualitas.

Sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis, kurikulum mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan siswa, yaitu (1) peran konservatif, hal ini sesuai dengan gagasan pendidikan itu sendiri, yang berfungsi sebagai jembatan antara siswa sebagai siswa dan orang dewasa, dalam interaksi sosial yang semakin lama semakin kompleks (2) peran kritis atau evaluatif, kurikulum akan berperan aktif dalam pengendalian sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Nilai sosial yang tidak lagi sesuai dengan kondisi masa depan telah dihilangkan, dan modifikasi serta perbaikan telah dilakukan. dan (3) peran kreatif, untuk membantu setiap orang menyadari potensi penuh mereka, kursus ini menciptakan kursus, pengalaman, cara berpikir, kemampuan dan keterampilan baru, yang semuanya bermanfaat bagi masyarakat.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam harus berdasarkan pada Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi. Dalam hal sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan, standar isi telah disesuaikan dengan esensi

tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, standar isi dirumuskan untuk menentukan ruang lingkup dan tingkat kompetensi berdasarkan kemampuan lulusan (yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang ditentukan dalam "Standar Kompetensi Lulusan". Karakteristik, penerapan, kesesuaian, lebar dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi dan proses kompetensi.

Ketiga kemampuan ini memiliki proses akuisisi yang berbeda. Sikap dibentuk melalui kegiatan: penerimaan, pelaksanaan, penghargaan, penghargaan dan praktik. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Keterampilan diperoleh melalui kegiatan berikut: observasi, pertanyaan, eksperimen, penalaran, presentasi dan kreasi. Perbedaan karakteristik kemampuan dan proses perolehannya akan memengaruhi standar isi¹⁰⁴.

Pelaksanaan pembelajaran diatur dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan

¹⁰⁴ Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016

pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. (1) Pola Pembelajaran Langsung (*Direct Instruction*), proses belajar mengajar model Direct Instruction dapat berbentuk ceramah, demonstrasi, pelatihan atau praktek dan kerja kelompok.

Saat menggunakan Direct Instruction, seorang guru juga dapat mengaitkan dengan diskusi kelas dan belajar kooperatif, sebagaimana dikemukakan oleh Kardi bahwa seorang guru dapat menggunakan Direct Instruction untuk mengajarkan materi atau keterampilan baru, kemudian diikuti oleh diskusi kelas untuk melatih siswa berfikir tentang topik tersebut, lalu membagi siswa menjadi kelompok-kelompok belajar kooperatif untuk menerapkan keterampilan yang baru diperolehnya dan membangun pemahamannya sendiri tentang materi pembelajaran. (2) Pembelajaran Tidak Langsung (*Indirect Instruction*), pada pembelajaran tidak langsung, peran guru bukan lagi sebagai guru diktator, melainkan sebagai fasilitator, penyemangat, dan sumber belajar, sehingga guru hanya memberikan umpan balik dan bimbingan kepada siswa.

Adanya penerapan pola ini, siswa akan termotivasi untuk memperoleh informasi tersebut, sehingga siswa memiliki lebih banyak ruang untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan pemberian jawaban. Rasa takut memberikan jawaban yang salah juga akan berkurang. Strategi pembelajaran ini juga akan membantu mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan keterampilan pribadi siswa. Ini karena ketika siswa mengembangkan kemampuan untuk mendeskripsikan pemahaman tersebut, mereka biasanya akan lebih memahami materi dan gagasan. (3) Pola Pembelajaran Tersembunyi (*Hidden Curriculum*), kurikulum tersembunyi adalah tingkah laku, sikap, cara berbicara, dan perlakuan guru terhadap siswa yang mengandung informasi moral. Menurut Dede Rosyada, inti dari *hidden curriculum* adalah kebiasaan sekolah dalam menerapkan disiplin kepada siswa, seperti ketepatan masuk kelas guru, kemampuan dan cara guru menguasai kelas, serta kebiasaan guru ketika memberi sanksi kepada siswa yang melanggar peraturan di dalam atau di luar kelas¹⁰⁵.

¹⁰⁵ M. Slamet Yahya, *Hidden Curriculum Pada Sistem Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Tahun 2013. Jurnal Kependidikan*, Vol. 1 No. 1 Nopember 2013), 128.

Proses pengembangan kurikulum pendidikan yang diawali dengan perencanaan kurikulum hingga pada tahap evaluasi. Dalam proses perencanaan dimulai dari menentukan atau mencari rumusan ide. Ide dapat berupa dari keadaan perkembangan zaman, visi-misi pemerintah dan yang lainnya. Hasil dari ide itu, lalu dikembangkan dan dituangkan menjadi sebuah program dalam bentuk dokumen. Setelah perencanaan dilakukan, maka kemudian diimplementasikan dalam bentuk pengalaman di lapangan. Untuk mengukur dan menguji tingkat keefektifan/ pencapaian tujuan pendidikan, maka dibutuhkan adanya evaluasi kurikulum. Hasil evaluasi ini akan diperoleh bekal untuk menyempurnakan kurikulum berikutnya¹⁰⁶.

Pengembangan kurikulum pendidikan Islam perlu memperhatikan hal-hal yang mendasar antara lain: Pertama, pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan/model keagamaan melalui semua pelajaran dan semua kegiatan. Kedua, penyusunan dalam kurikulum disesuaikan dengan taraf dan standar perkembangan pemahaman dan kemampuan para peserta didik. Ketiga, dalam penyusunan harus berlandaskan prinsip kesinambungan/keberlanjutan, terintegrasi dan sistematis.

¹⁰⁶ Fajri, K. N. *Proses Pengembangan Kurikulum. Islamika*, 1(2), 35–48.2019

Pengembangan kurikulum dilakukan secara berjenjang, hal ini mengacu pada pola pikir manajemen, antara lain berdasarkan tingkat makro, tingkat struktural, tingkat mikro, tingkat individual.

Pengembangan kurikulum merupakan sebuah dinamika yang mampu merespon tuntutan perubahan struktural pemerintahan, perkembangan dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi yang terjadi dan sangat dipengaruhi oleh sumber daya pendukung yakni sumber daya manusia. Pengembangan kurikulum diformulasikan berdasarkan dua bagian penting, Pertama, melihat berdasarkan perkembangan atas kebutuhan, tuntutan, dan kondisi yang terjadi di masyarakat saat itu. Kedua, harus berdasarkan pemikiran dan ide yang mempunyai arah pencapaian pada nilai filosofis. Adapun yang paling utama dan inti dari pengembangan kurikulum berdasarkan sudut pandang islam ialah kebenaran yang bersifat universal dan fundamental dan tidak dapat diubah adalah tauhid. Beberapa unsur yang harus terlihat dalam kurikulum pendidikan Islam antara lain ketauhidan (aqidah), keagamaan (syariah), pengembangan hubungan antar manusia, pengembangan potensi manusia, serta pengembangan diri sebagai individu.

Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah umum saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini disebabkan dengan banyaknya kendala yang terjadi di lapangan., maka diperlukan pedoman dan acuan untuk pegangan dalam melakukan pembinaan pendidikan agama Islam di sekolah¹⁰⁷. Regulasi Pendidikan Agama Islam (PAI) saat ini dinilai telah usang. Pembaharuan regulasi menjadi fokus program yang akan segera dilaksanakan oleh Direktorat PAI. Aturan yang dipakai sampai saat ini adalah Keputusan Menteri Agama No 211 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional PAI pada sekolah. Harapan besar terhadap pengembangan kurikulum PAI di sekolah adalah tentang aspek sikap dan karakter peserta didik. Namun situasi ini yang menjadi sorotan, karena terjadinya merosotan moral dan karakter para generasi muda saat ini. Guru PAI dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab terhadap moral peserta didik di sekolah. Hal ini lumrah dan biasa tentunya, mengingat isi materi PAI yang kaya akan nilai-nilai luhur yang sempurna dan baik.

¹⁰⁷ Khoiruddin, M. Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Islam. *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 141–154.2016

H. Pendidikan Agama Islam Multikultural

Pendidikan agama berbasis multikultural merupakan proses penyadaran yang bersendikan toleransi yang ditujukan sebagai usaha komprehensif dalam mencegah terjadinya konflik antar agama, mencegah terjadinya radikalisme agama, sekaligus pada saat yang sama memupuk terwujudnya sikap yang apresiatif positif terhadap pluralitas, dalam dimensi dan perspektif apapun¹⁰⁸. Guru dan sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan agama islam, mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman yang inklusif dan moderat di sekolah. Apabila guru mempunyai paradigma pemahaman keberagaman yang inklusif dan moderat, maka dia juga akan mampu mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman tersebut pada siswa di sekolah.³⁸ Peran guru dalam hal ini meliputi; pertama, seorang guru/dosen harus mampu bersikap demokratis, baik dalam sikap maupun perkataannya tidak diskriminatif. Kedua, guru/dosen seharusnya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada hubungannya dengan agama.

¹⁰⁸ Arif Mahmud, "Pendidikan Agama Islam Inklusif-Multikultural", *Jurnal Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2012.

Pendidikan agama berbasis inklusivistik- multikultural mesti hijrah dari moralitas individual ke moralitas publik; berusaha memutasikan Tuhan dari konsep utopis-metafisis menuju landing to the earth dan berusaha melakukan lokalisasi akidah dan desentralisasi fikih. Hal ini mengindikasikan perlunya perimbangan dalam pembelajaran pendidikan agama islam multikultural antara materi yang berupa teks dan konteks. Bahwa teks berisi ajaran normatif yang masih bersifat umum, sementara konteks berupa realitas empirik-faktual yang bersifat partikular¹⁰⁹. Persoalan seringkali muncul justru ketika teks berhadapan dengan realitas partikular yang heterogen tersebut. Karena itu, materi pelajaran justru harus berisi realitas yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, meskipun materi yang diberikan memuat teks-teks normatif, namun ia juga harus berisikan kasus-kasus konkrit di masyarakat sehingga anak sadar bahwa ia hidup dalam situasi nyata yang penuh perbedaan.

Pola pendidikan agama yang semacam ini menjadikan manusia terasing dari agamanya bahkan dengan kehidupannya sendiri. Mereka terperangkap dengan pemahaman ajaran agama yang bersifat permukaan dan bersifat legal-formalistik yang hanya terkait dengan

¹⁰⁹ Mahfud Choirul, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

persoalan halal-haram, iman-kafir, surga-neraka. Dan persoalan-persoalan lain seumpama dengan itu. Sedang ajaran dasar agama yang syarat dengan nilai-nilai spiritual dan moralitas, semisal kedamaian dan keadilan, menjadi terbengkalai, tidak pernah disentuh secara serius. Akibatnya, pesan dan misi agama yang bersifat pereneal terbenam dibalik keberagamaan eksklusif. Teks-teks suci dibaca tiap hari namun maknanya yang hakiki tidak terwujud dalam kehidupan.

Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural sebagai upaya ikhtiar mendorong siswa untuk menjalankan agama dengan taat beragama, tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing, sehingga dengan demikian wajah keberagamaan yang ditampilkan oleh pendidikan agama islam multikultural adalah identitas agama yang lebih menampilkan sisi moderat dan toleran sebagai upaya pencegahan radikalisme. Dengan demikian, titik tumpu pendidikan agama islam multikultural inklusivistik ini sesungguhnya terletak pada adanya pemahaman dan ikhtiar mujahadah untuk hidup bersama dalam konteks perbedaan agama dan budaya¹¹⁰. Sehingga dengan pendidikan agama islam multikultural akan selalu berusaha memahami nilai-nilai bersama

¹¹⁰ Rohman Abdul, Eria Ningsih Yenni, Penguatan Identitas Nasional Melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Progam Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2016)

yang dapat di-sharing sebagai dasar untuk hidup bersama serta memberi dampak positif di era revolusi industri 4.0 sekarang. . Dalam hal ini, yang paling penting dilakukan adalah melakukan reorientasi visi pendidikan agama Islam yang berbasis eksklusif-monolitis ke arah penguatan visi inklusif-multikulturalis. Inilah yang mesti kita renungkan bersama agar pendidikan agama kita tidak menyumbangkan benih-benih konflik antar agama dan aksi-aksi radikalisme atas nama agama dapat diminimalisir untuk masa depan Indonesia yang lebih kondusif tentunya.

Nilai dasar dalam pendidikan multikultural adalah toleransi. Oleh karena itu, toleransi merupakan sikap kewargaan yang aktif, bukan sikap yang spontan. Sikap toleran tidak akan tertanam dengan sendirinya, tanpaada usaha .sadar mengintemalisasinya. Toleransi harus dididikkan, tidak cukup berhenti pada wacana. Keputusan majelis .ulama, keputusan konsili, kesepakatan sidang dewan gereja-gereja sedunia, dan kesepakatan hasil pertemuan tokoh agama yang menganjurkan toleransi tidak akan cukup efektif bila hanya berhenti di kerta sdan bibir, tanpa dukungan pendidikan dalam arti luas.

Pembelajaran berbasis multikultural merupakan pembelajaran yang didasarkan pada gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan,

kesederajatan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Hakekat pendidikan multikultural mempersiapkan seluruh siswa untuk bekerja secara aktif menuju kesamaan struktur dalam organisasi dan lembaga sekolah¹¹¹. Pendidikan multikultural bukanlah kebijakan yang mengarah pada pelembagaan pendidikan dan pengajaran inklusif dan pengajaran oleh propaganda pluralisme lewat kurikulum yang berperan bagi kompetisi budaya individual.

Pembelajaran berbasis multikultural berusaha memberdayakan siswa untuk mengembangkan rasa hormat kepada orang yang berbeda budaya, memberi kesempatan untuk bekerja bersama dengan orang atau kelompok orang yang berbeda etnis atau rasnya secara langsung. Pendidikan multikultural sangat relevan dilaksanakan dalam mendukung proses demokratisasi, dimana pada pendidikan multikultural terdapat beberapa hal terkait mengenai; pengakuan hak asasi manusia, tidak adanya diskriminasi dan diupayakannya keadilan sosial.¹¹²

Pendidikan multikultural ini dimungkinkan seseorang dapat hidup dengan tenang di lingkungan kebudayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat

¹¹¹ Suastika, I. N. .; Suartama, I. K. .; Sanjaya, D. B.; Arta, 2021

¹¹² Hjerm, M., Seva, I. J., & Werner, L. (2018)

majemuk dan bahkan paling majemuk di dunia, karena itu agar kemajemukan ini tidak berkembang menjadi ancaman disintegrasi harus diupayakan untuk dikelola.

I. Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam (PAI) secara bertahap dan holistik diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar mantap secara spiritual, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman akan dasar-dasar agama Islam serta cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia¹¹³. Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman¹¹⁴. Pendidikan agama Islam sebagai upaya mempersiapkan peserta didik guna menyakini, memahami,

¹¹³ Khalijah, S., and Z. Zuliana. "Analisis Isi Materi Pendidikan Agama Islam Pada Kurikulum Merdeka". *Journal of Education Research*, vol. 5, no. 1, Mar. 2024, pp. 935-8,

¹¹⁴ Abdul, Majid. *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya.2019)h.34

serta mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, dan pelatihan.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), kurikulum ini memungkinkan guru untuk menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka Belajar juga memberikan keleluasaan bagi guru dalam memilih berbagai perangkat terbuka sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik¹¹⁵. Hasil dalam menemukan isi materi Pendidikan Agama Islam Pada Kurikulum Merdeka: Pada komponen rumusan tujuan pembelajaran mencakup ketiga prinsip, ideal memuat 2 komponen yaitu Pertama, kompetensi yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; Kedua, konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran.

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik mampu memahami materi yang disampaikan dan untuk guru agar lebih leluasa dalam memilih strategi, media, atau bahkan metode

¹¹⁵ Amalia, Jihanna. & Achadi, Muh. Wasith. Analisis Kurikulum Merdeka Belajar Materi PAI pada Kelas 10 SMK Negeri 1 Depok Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 03, No. 01.2023

pembelajaran yang cocok dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik, Tentunya juga didorong oleh beberapa Proyek¹¹⁶.

Keberhasilan pembelajaran pendidikan Agama Islam juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam memilih materi esensial serta menyusun alur tujuan pembelajaran yang sistematis berdasarkan keperluan serta kewajiban siswa. Oleh sebab itu, guru pendidikan Agama Islam harus memahami sistematika pembelajaran dalam kurikulum merdeka serta mampu menguasai dengan baik materi-materi esensial yang wajib disampaikan dan dikuasai oleh setiap peserta didik¹¹⁷.

Materi yang diajarkan dalam buku pendidikan agama Islam kurikulum merdeka ini sejalan dengan upaya untuk pengembangan peserta didik, yaitu nilai-nilai dan ajaran Islam yang sangat mulia dan luhur untuk dijadikan suatu habit dalam penanaman sikap, memperluas wawasan dan pengetahuan, serta mengembangkan keterampilan peserta didik agar menjadi muslim yang kaaffah. Buku

¹¹⁶ Hamdan. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Teori dan Praktek*. (Aswaja Pressindo,2014)

¹¹⁷ Rifa'I, Ahmad, N. Elis Kurnia Asih, Dewi Fatmawati. Penerapan Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran PAI Di Sekolah, *Jurnal Syntax Admiration* 3(8),2022.h 12

ini juga menghadirkan nilai-nilai moderasi beragama yang perlu diserap oleh peserta didik. Penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini penting dilakukan karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Materi dalam buku Pendidikan Agama Islam ini dikembangkan untuk membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengembangan materi buku ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :1) Potensi intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan potensi vokasional siswa; 2) Tingkat perkembangan fisik; 3) Kebermanfaatan dan relevansi bagi siswa; 4) Struktur keilmuan; 5) Aktualitas, kedalaman dan keluasan materi pada setiap aspek (Al-Qur'an, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam); dan 6) Alokasi waktu.

Implementasikan kurikulum merdeka belajar dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam, perlu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian diantaranya adalah: Pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus dapat merangsang sikap kritis siswa. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus berkaitan dengan konteks kekinian serta kebermanfaatan. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus dapat menumbuhkan kreativitas siswa. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus membuat siswa dapat berkolaborasi dan berkomunikasi

dengan baik. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus dapat membuat siswa memiliki rasa percaya diri¹¹⁸.

J. Program *In Service Training* Bagi Guru PAI

Kata *In Service Training* merupakan kata yang berasal dari Bahasa Inggris, sedangkan dalam Bahasa Indonesia *In Service Training* tersebut dapat diartikan sebagai pelatihan dalam tugas. *In service training* secara istilah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah serta meningkatkan mutu petugas pendidikan dalam menjalankan tugasnya¹¹⁹. Selain itu, dalam pengertian lain dijelaskan bahwa *In Service Training* merupakan pendidikan dan pelatihan yang diorganisasikan secara sistematis yang bertujuan meningkatkan keterampilan, pemahaman dan mereformasi pendidik untuk masa sekarang dan yang akan datang¹²⁰.

In Service Training adalah proses pendidikan yang ditujukan kepada pegawai yang sudah berstatus tetap, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan terhadap bidang yang

¹¹⁸ Darise, G. N. Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks “Merdeka Belajar”. *Journal of Islamic Education: The Teacher of Civilization*, 2(2)2021.

¹¹⁹ Baharun, H. Peningkatan Komunikasi Guru Melalui Sistem Kepemimpinan Kepala Madrasah. *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 2017. 17.

¹²⁰ Mahmuda. Pengembangan Pedoman *In Service Training* Pada Kurikulum 2013 Melalui Kkg-Pai Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Pai Di Kecamatan Panji Situbondo. *JPPI*, 21.2016.h.12

ditekuninya. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin maju, maka seorang pegawai harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut¹²¹. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *In Service Training* merupakan salah satu kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi seorang pendidik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman pendidik/guru dari segi kompetensi.

Pelatihan dalam organisasi kerja pada dasarnya adalah sebuah proses belajar, yang memberikan di mana kesempatan belajar ini disusun secara sengaja sebagai hasil oleh pihak manajerial, SDM dan staf pelatihan, atau oleh agen eksternal yang bertindak atas nama mereka. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu pegawai yang diperlukan untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan serta sasaran organisasi dengan cara yang paling hemat biaya. Dengan demikian suatu program pelatihan diselenggarakan untuk mengubah apa yang pegawai ketahui, bagaimana mereka bekerja, atau sikap mereka terhadap pekerjaan,

¹²¹ Kornelius, Margono, A., & Hartutiningsih. Pendidikan dan Pelatihan Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMP Negeri 27 Sendawar KAbupaten Kutai Barat. *eJournal Administrative*, 2, 2014. 1811-1823.

rekan kerja, manajer, dan organisasi dimana mereka bekerja. Dengan kata lain tujuan utama pelatihan adalah agar para pegawai dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien.

Pelatihan adalah suatu proses yang direncanakan untuk memodifikasi sikap, pengetahuan atau keterampilan melalui pengalaman belajar untuk mencapai kinerja yang efektif dalam suatu kegiatan atau berbagai kegiatan¹²². Tujuannya, dalam situasi kerja, adalah untuk mengembangkan kemampuan individu dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan organisasi.

Menurut *Management Association, Information Resources*, terdapat dua jenis pelatihan yang dapat diberikan kepada guru yaitu pelatihan pre-service training dan in-service training¹²³. Pre-service training mengacu pada pada program pendidikan guru di tingkat perguruan tinggi yang berorientasi pada menyiapkan calon-calon tenaga pendidik profesional melalui jenjang pendidikan formal, sementara in-service training mengacu pada program pendidikan yang diterima guru setelah memasuki profesi seperti pelatihan keterampilan

¹²² Dennis Nickson, *Human Resource Management for Hospitality and Tourism Industries*, (New York: Routledge, 2013), h. 143

¹²³ Management Association, *Information Resources, Social Issues in the Workplace: Breakthroughs in Research and Practice: Breakthroughs in Research and Practice*, (Hershey, P.A.: IGI Global, 2017). h. 512-54

mengajar, keterampilan penelitian dan bidang-bidang kebutuhan lainnya di dunia akademis.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa pendidikan formal yang telah ditempuh seorang calon guru melalui lembaga-lembaga perguruan tinggi pada program studi-program studi ilmu kependidikan (PTIK) tidak serta merta menjadikan para calon guru tersebut benar-benar siap mempraktikkan teori-teori yang telah mereka terima ke dalam praktik langsung dalam proses pembelajaran, karena pengalaman mengajar di kelas tidak dapat disimulasikan dengan pre-service training. Dengan demikian melalui *in-service training*, para guru baru tersebut dapat belajar dari pengalaman-pengalaman melalui guru-guru yang telah berpengalaman. Selain itu, in service training atau in-service education merupakan bentuk pendidikan berkelanjutan pengembangan profesi guru secara terus menerus yang diberikan setelah guru tersebut memasuki profesi mengajar.

Pendidikan *in-service* dapat didefinisikan sebagai pendidikan berkelanjutan bagi guru dan pendidik lainnya yang dimulai setelah pendidikan profesional awal berakhir, dan mengarah pada peningkatan kompetensi profesional pendidikan sepanjang karir mereka. Dengan kata lain, in-service training dirancang untuk mendukung

pengembangan profesi guru secara terus menerus yang diberikan setelah guru tersebut memasuki profesi mengajar dan melaksanakan tugas-tugas pokok mereka sebagai seorang pendidik. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa : “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”¹²⁴.

In-service training adalah bentuk pengembangan staf yang lebih spesifik. Istilah ini mengacu pada pelatihan formal yang terencana dan diberikan kepada sekelompok personil agen yang dibatasi yang memiliki klasifikasi pekerjaan yang sama atau tanggung jawab pekerjaan yang sama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *in-service training* merupakan usaha pengembangan profesionalisme pegawai dalam bentuk pelatihan formal yang diberikan kepada para pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Berdasarkan pendapat ini, maka *in-service training* dalam pengembangan profesionalitas guru diberikan kepada guru-guru yang

¹²⁴ Ames E. Allen, *Assisted Living Administration : The Knowledge Base*, -2nd ed., (New York: Springer, 2004), h. 153

mengampu mata pelajaran yang sama yang diselenggarakan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di tingkat Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas, serta oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) di tingkat sekolah dasar.

Melaksanakan pelatihan dalam jabatan (*in-service training*) adalah faktor kunci untuk melakukan perubahan dalam paradigma pembelajaran. *In-service training* ini dimaksudkan agar para guru tetap memiliki pengetahuan yang terkini (*up-to-date*) tentang isi kurikulum, terus mengembangkan strategi pengajaran dan penilaian kelas serta, mengembangkan peranan kepemimpinan di dalam kelas¹²⁵.

Pendapat di atas menekankan pentingnya guru-guru dalam jabatan untuk terus mengembangkan diri dan melakukan upgrading kemampuan mereka agar tetap *up-to-date*, terutama dengan perubahan-perubahan paradigma pembelajaran yang sebelumnya lebih didominasi oleh peran guru (*teacher-centered*) menjadi pembelajaran yang lebih menekankan peran aktif siswa dalam pembelajaran (*student-centered*).

Guru juga harus selalu mengikuti dan memiliki kemampuan mengantisipasi perubahan dan perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi (TIK), perubahan kurikulum, perkembangan model,

¹²⁵ Christopher Day, *Developing Teachers: The Challenges of Lifelong Learning*, (Philadelphia, Falmer Press, 1999), h. 148.

pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Di samping itu paradigma tentang penilaian pembelajaran yang sebelumnya hanya mengukur aspek pengetahuan siswa melalui penilaian berbasis tes juga mengalami perubahan dengan munculnya model-model penilaian otentik yang menekankan perlu melakukan penilaian secara komprehensif dan aktual yang tidak hanya mengukur aspek pengetahuan saja, akan tetapi juga mampu mengukur sikap keterampilan siswa berdasarkan kinerja yang mereka tampilkan.

In-service training mencakup semua jenis pelatihan dan kegiatan di mana seorang guru secara sistematis dan terencana memperoleh pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan perilaku terkait agardapat menjalankan tugas-tugas pokoknya dan memperluas pengetahuan profesional, minat, atau keterampilannya dalam menjalankan profesi keguruan. Uraian di atas menjelaskan bahwa *in-service training* merupakan bentuk pelatihan kepada guru-guru dalam jabatan yang dilakukan secara terus menerus sepanjang karir mereka untuk meningkatkan profesionalitas mereka dalam menjalankan tugas-tugas profesi keguruan.

Dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan yang dimiliki oleh guru maupun karyawan dalam sebuah lembaga sekolah maka perlu dilakukan kegiatan *In Service Training* (pelatihan dalam jabatan). Hal ini dimaksudkan agar guru dan tenaga kependidikan yang ada dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki secara efektif dan efisien. Program *In Service Training* ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh guru seperti berupa pelatihan, workshop, seminar, kursus dan lain sebagainya yang dilakukan oleh internal maupun eksternal kelembagaan.

Pelatihan dalam jabatan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur formal maupun informal. Jika *In Service Training* ini dilakukan secara formal maka pelaksanaannya adalah pemerintah yang berupa penataran atau lokakarya yang berbentuk lisan atau tertulis. Sedangkan jika dilakukan secara informal maka pelaksanaannya yaitu orang yang berkepentingan baik secara individual maupun secara kelompok ¹²⁶.

Seorang guru akan memiliki tingkat kemampuan yang sangat tinggi, ketika mampu melakukan pekerjaannya secara profesional. Di

¹²⁶ Baharuddin, & Kanada, R. Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui In House Training. *Journal of Islamic Education Management*, 2017. 1-20.

dorong oleh inovasi yang semakin hari semakin berkembang, menjadikan seorang guru harus selalu up-date, baik dari teknologi maupun informasi. Agar dapat mencapai tingkatan tersebut, seorang guru haruslah melakukan training service atau yang di sebut pelatihan lanjutan. *In Service Training* merupakan kegiatan yang sering disediakan oleh pemerintah dan terima oleh para pendidik. Manfaat yang didapat dalam melaksanakan *In Service Training* adalah untuk menambah dan mempertinggi mutu pengetahuan, meningkatkan kecakapan dan pengalaman pendidik sebagai modal dalam melaksanakan proses belajar mengajar¹²⁷.

Dalam perumusan kebijakan, seorang pembuat kebijakan harus melihat alasan mengapa kebijakan tersebut dibuat. Lembaga yang diamanahi oleh rakyat sebagai pembuat kebijakan adalah DPR. Perumusan kebijakan Profesi Profesional Guru (PPG) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru, dimana dalam PPG ini dibagi lagi menjadi dua tahapan yaitu *in service education* dan *In Service Training*.

In service education merupakan pelatihan yang didapatkan melalui pendidikan formal didalam kampus. Sedangkan *In Service*

¹²⁷ Sudana, I. M. Analisis Meta Pada Manajemen Pasca Pelatihan Untuk Meningkatkan Produktivitas Guru Di SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 2011. 143-144.

Training yaitu pendidikan yang di selenggarakan oleh pemerintah yang berbentuk diklat bagi guru yang sudah mengajar di sekolah. Dalam *In Service Training* atau diklat guru didalamnya ada beberapa tahap atau kelas yaitu diklat dasar, diklat lanjutan, diklat menengah dan diklat tinggi.

Secara lebih spesifik, terdapat dua tujuan utama diselenggarakannya inservice training¹²⁸, pertama, berfokus pada pengembangan profesionalitas guru. Berdasarkan pada tujuan ini, maka in-service training harus mampu : a) membuat para guru merasa dihargai dalam pekerjaan yang mereka lakukan, b) memberikan umpan balik positif sehingga memungkinkan mereka melakukan pekerjaan dengan baik sehingga meningkatkan kepuasan motivasikerja, c) mendorong mereka untuk mendapatkan kegembiraan dan kepuasan dari keterlibatan mereka dalam kegiatan pelatihan, serta d) menjadikan mereka lebih kompeten untuk berkontribusi secara konstruktif untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Kedua, *in-service training* berkaitan dengan tanggung jawab moral, sosial, dan instrumental guru dalam melaksanakan tugasnya, maka in-service training memiliki peran penting dalam menyediakan

¹²⁸ Centre For Educational Research And Innovation, *Staying Ahead In-service Training and Teacher Professional Development*, (Paris, OECD, 1998), h. 18

kesempatan formal maupun informal untuk melanjutkan pengembangan guru dalam: a) Melanjutkan pengembangan dan melakukan adaptasi terkait materi pelajaran yang diampu gurusecara pedagogis, b) memperbaiki praktik-praktik pembelajaran yang sedang berlangsung melalui pengalaman, refleksi, dan teori-teori tentang cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan siswa baik secara individu maupun berkelompok, c) memberikan kesempatan kepada guru untuk belajar secara berkelanjutan melalui pengamatan dan diskusi bersama dengan rekan seprofesi mereka disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan menghadapi terjadinya perubahan.

Pelaksanaan *in-service training* tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan profesional guru, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab moral, sosial, dan instrumental guru dalam menjalankan tugas keprofesian mereka. Menurut Christopher Day, *in-service training* merupakan bagian penting dan berpotensi kuat mengembangkan profesional guru secara berkelanjutan. Melalui *in-service training*, para guru memperoleh kesempatan untuk menerapkan kurikulum dan meningkatkan keterampilan mengajar tidak hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, namun juga meningkatkan keterampilan guru dalam melaksanakan berbagai model penilaian yang

pada ujungny akan berdampak pada peningkatan kualitas kinerja guru tersebut.

Bentuk pelaksanaan kegiatan *in service training* pada umumnya dibedakan menjadi dua cara¹²⁹, yaitu: 1) Pengembangan secara formal: Karyawan ditugaskan oleh lembaga mengikuti pendidikan & latihan, baik yg dilakukan lembaga sekolah itu sendiri maupun oleh lembaga pendidikan/pelatihan, karena tuntutan pekerjaan untuk saat ini atau masa datang. 2) Pengembangan secara informal: Karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku- buku literatur yg berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya.

Implementasi dari pelaksanaan kegiatan *in service training* secara formal bermacam-macam antara lain berupa pelatihan-pelatihan, penataran, workshop, kursur-kursus, seminar, diskusi atau mimbar, baik yang dilakukan oleh intern kelembagaan atau ekstern kelembagaan. Tentunya tidak hanya sebatas menjadikan pelatihan, pelatihan dan seminar tetapi perla dipikirkan bagaimana format suatu kegiatan agar menjadi lebih efektif dan efisien.

¹²⁹ Christoper Day, Op.cit, h. 150

Langkah-langkah dalam melaksanakan pelatihan (*inservice training*)¹³⁰, berikut ini: 1). Menentukan Kebutuhan Pelatihan, Langkah pertama dan utama dalam program pelatihan adalah menentukan apakah ada kebutuhan yang diperlukan untuk pelatihan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan melalui analisis kebutuhan organisasi, analisis kebutuhan jabatan, survey sikap individu, ataupun analisis kebutuhan demografis. 2). Menyusun Desain Pelatihan, Informasi dari hasil identifikasi kebutuhan pelatihan merupakan masukan yang berharga untuk penyusunan desain pelatihan. Penyusunan desain pelatihan setidaknya perlu mencakup tujuan program pelatihan, struktur program pelatihan, peserta, pelatih/fasilitator, metode, dan penilaian hasil akhir. 3) Mengembangkan Isi Program, Program latihan harus mempunyai isi yang sama dengan tujuan belajarnya. Isi program mencakup keahlian/keterampilan, sikap, pengetahuan yang merupakan pengalaman belajar pada pelatihan yang diharapkan dapat menciptakan perubahan tingkah laku. 4). Memilih Media Pelatihan dan prinsip belajar, Usaha pencapaian tujuan pelatihan perlu ditunjang oleh penggunaan alat bantu serta media yang tepat agar sesuai dengan

¹³⁰ Moekijat. *Evaluasi Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas*. (Bandung: Mandar Maju, 2008). h. 50

karakteristik penggunaannya. Prinsip-prinsip belajar merupakan petunjuk/ prosedur.

Pelaksanaan latihan Pelaksanaan pelatihan merupakan perwujudan tindakan nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Pelaksanaan pelatihan meliputi tiga tahap, yaitu: (1) Pra pelatihan adalah penentuan kriteria dan seleksi orang-orang yang terlibat dalam latihan, metode yang digunakan, penetapan biaya dan waktu pelatihan. (2) Pelaksanaan pelatihan, dalam hal ini hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan, aturan, dan persyaratan pelaksanaan latihan. (3) Pasca pelatihan dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap hasil belajar dengan pelaksanaan program latihan.

Mengevaluasi latihan Pelaksanaan suatu pelatihan dapat dikatakan berhasil apabila dalam diri peserta tersebut terjadi transformasi, dengan peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan perubahan perilaku yang tercermin pada sikap, disiplin, dan etos kerja. Transfer Pelatihan Tujuan akhir setiap program pelatihan adalah bahwa pembelajaran yang terjadi selama pelatihan ditransfer kembali ke dalam pekerjaan. Transfer pelatihan adalah tingkat aplikasi pengetahuan, keahlian, kemampuan, atau karakteristik lainnya yang dipelajari dalam pelatihan terhadap pekerjaan.

K. Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Guru PAI

Ada tiga tugas pokok pemerintah terhadap masyarakat agar masyarakat hidup tumbuh dan berkembang, yaitu; tugas pelayanan publik, tugas pembangunan, dan tugas pemberdayaan. Dari ketiga tugas tersebut, pemerintah bertugas memberikan pelayanan umum atau pelayanan publik baik pelayanan primer, pelayanan sekunder, maupun pelayanan tertier. Salah satu pelayanan primer atau pelayanan yang paling mendasar yang harus dilakukan pemerintah adalah pelayanan pendidikan sebagai salah satu *core policy* berkenaan dengan tugas *core task* dan *core competencies* dari sektor publik¹³¹.

Secara teknis untuk melaksanakan pelayanan pendidikan, pemerintah menuangkan dalam bentuk kebijakan pendidikan yang dituangkan dalam berbagai bentuk regulasi yang selanjutnya diimplementasikan dalam ranah operasional. Untuk itu, berikut ini akan dibahas mengenai implementasi kebijakan pendidikan. Sebelumnya terlebih dahulu digali apa itu arti implementasi, arti kebijakan, arti kebijakan pendidikan dan arti implementasi kebijakan pendidikan.

¹³¹ Nadhirina, Soesilowati,E, &Utomo, C.B. Implementasi kebijakan manajemen berbasis sekolah di smk negeri 4 kendal. *Educational Management* ,6 (2) (2017) 155 – 162

Istilah implementasi diserap dari bahasa Inggris *Implementation* yang berarti pelaksanaan.

Implementasi diartikan sebagai membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Dengan demikian, istilah implementasi dapat diartikan membawa suatu rencana untuk diselesaikan atau dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga menghasilkan capaian tujuan yang diinginkan¹³².

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy*. Menurut James E. Anderson¹³³ mendefinisikan *policy* sebagai sebuah kebijakan didefinisikan sebagai tindakan bertujuan yang relatif stabil diikuti oleh aktor atau sekelompok aktor dalam menghadapi masalah yang menjadi perhatian. Dalam pengertian ini, kebijakan merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan ditetapkan oleh aktor untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Anderson, aktor yang berperan dalam menetapkan kebijakan dapat berasal dari aktor formal maupun aktor nonformal.

¹³² Nadhirina, Soesilowati,E, &Utomo, C.B. Implementasi kebijakan manajemen berbasis sekolah di smk negeri 4 kendal. *Educational Management* ,6 (2) (2017) 155 – 162

¹³³ Anderson, J. E. *Public policymaking: an introduction*. (Boston. Houghton Mifflin Company.2003). h. 34.

Aktor formal seperti birokrasi, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan aktor nonformal adalah pihak-pihak yang berkepentingan seperti partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau warganegara. Dengan demikian, dalam membuat kebijakan dipengaruhi oleh latar belakang aktor maupun nilai-nilai yang dianut para aktor, di antaranya: nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai kebijakan dan nilai-nilai ideologinya.

Pendapat lain dikemukakan oleh¹³⁴ yang mendefinisikan *policy* sebagai sebuah kebijakan kadang-kadang merupakan hasil kompromi politik di kalangan pembuat kebijakan, yang tak satu pun di antaranya memikirkan masalah yang menjadi alasan kebijakan adalah solusinya dan terkadang kebijakan-kebijakan tidak diputuskan, namun demikian 'terjadi'. Pandangan ini menempatkan para pembuat kebijakan termasuk diantaranya pemerintah berada pada posisi sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam membuat kebijakan bahkan seolah memberi gambaran bahwa produk kebijakannya lebih bersifat *topdown*.

Fowler¹³⁵ secara singkat mendefinisikan *policy* sebagai berikut:
policy as a chain of decisions stretching from the statehouse to the classroom is a byproduct of [many] games and relationships; no one

¹³⁴ Fowler, F. C. *Policy studies for educational leaders.*(United State of America: Pearson.2009) h.35

¹³⁵ Fowler, F. C. *Policy studies for educational leaders....h. 36*

responsible for the whole thing. Kebijakan sebagai rangkaian keputusan yang merentang dari gedung negara ke kelas adalah hasil sampingan dari banyak permainan dan hubungan; tidak ada yang bertanggung jawab atas semuanya. Pandangan Firestone ini selain menggambarkan bahwa kebijakan bersifat *topdown* juga memberi kesan bahwa kebijakan merupakan produk politik sebagaimana dinyatakan kebijakan sebagai hasil samping dari banyak permainan.

Thomas R. Dye¹³⁶ mendefinisikan kebijakan sebagai “*whatever goverments choose to do or not to do*” bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan merupakan kebijakan. Interpretasi dari kebijakan menurut Dye memiliki dua makna: *Pertama*, setiap kebijakan harus dilakukan oleh pemerintah, dan *Kedua*, kebijakan tersebut memiliki dua pilihan yaitu dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Pendapat lain oleh¹³⁷ bahwa kebijakan merupakan sebuah proses politik, yang mana kebutuhan, sasaran, dan keinginan diwujudkan dalam bentuk tujuan, peraturan, dan kegiatan, yang selanjutnya akan berpengaruh pada alokasi sumberdaya, tindakan, dan

¹³⁶ Thomas R. Dye. *Understanding public policy*. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. 1992) h. 26

¹³⁷ Cooper, S. B., Lance D. F., E. Vance R., et al. *Better policies, better schools: theories and applications*. Boston: Pearson Education, Inc.2004. h.15

hasil, sebagai pijakan untuk melakukan evaluasi, reformasi, dan melahirkan kebijakan yang baru.

Pandangan ini menguatkan bahwa kebijakan merupakan produk politik berupa peraturan-peraturan yang memuat program dengan tujuan untuk melakukan perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan sebuah keputusan berupa program, tindakan, dan kegiatan sebagai hasil proses politik yang dituangkan dalam seperangkat peraturan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah-masalah sosial termasuk masalah pendidikan. Sedangkan kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam melayani kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, pengertian tentang kebijakan pendidikan dikemukakan oleh pakar pendidikan, di antaranya Rohman¹³⁸ menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik yang berupa keputusan sebagai pedoman untuk bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar

¹³⁸ Rohman, A. *Membebaskan pendidikan: refleksi menuju penyelenggaraan demokrasi pendidikan di Indonesia*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo.2012) . h. 23

untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pendapat tersebut memberi gambaran bahwa kebijakan pendidikan memiliki tiga muatan; yaitu *pertama*, muatan politik, karena kebijakan pendidikan merupakan hasil proses politik, *kedua* muatan keputusan, yaitu berupa program atau tindakan, dan *ketiga* muatan tujuan, kebijakan merupakan alat untuk memecahkan masalah terkait penyelenggaraan pendidikan.

Pendapat lain dikemukakan oleh¹³⁹ bahwa kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Dalam pandangan Tilaar, kebijakan pendidikan memiliki landasan filosofis, yaitu filsafat manusia, filsafat politik, sosial, ekonomi dan budaya, serta landasan teori pendidikan, yaitu kebijakan pendidikan (program, pelaksanaan), dan analisis kebijakan (evaluasi, riset, dan pengembangan).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas. Beberapa aspek yang

¹³⁹ Tilaar, H., & Nugroho, R. *Kebijakan pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2009) h.26

tercakup dalam kebijakan pendidikan meliputi: hakikat manusia, ilmu pendidikan, perkembangan pribadi serta masyarakat, adanya keterbukaan, berbasis riset dan pengembangan, sebagai bagian dari kebijakan publik, berorientasi pada peserta didik, berorientasi pada terbentuknya masyarakat demokratis, terkait dengan visi-misi pendidikan, dan memiliki efisiensi yang tinggi. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat dipandang sebagai bagian dari kebijakan publik, dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik.

L. Analisis Kebijakan Penguatan Pendidikan Guru PAI

Menurut ¹⁴⁰ analisis kebijakan merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial yang diawali dengan menciptakan pengetahuan tentang pembuatan kebijakan dan proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Selanjutnya, hasil analisis kebijakan dapat digunakan untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

Analisis kebijakan juga dapat memberi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan: apa hakikat permasalahan? Kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan bagaimana hasilnya? Seberapa besar dapat memberi

¹⁴⁰ Dunn, W.N. *Pengantar analisis kebijakan publik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press.1999). h.56

makna dalam memecahkan masalah? Alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah? Dan hasil apa yang dapat diharapkan? Jawaban pertanyaan tersebut dapat memberi informasi tentang masalah kebijakan, masa-depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan.

Terkait metodologi analisis kebijakan, Dunn¹⁴¹ merekomendasikan melalui lima prosedur tahapan, *Pertama*; Perumusan masalah (definisi) yang menghasilkan informasi tentang kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan, *Kedua*; Peramalan (prediksi) yang menghasilkan informasi mengenai konsekuensi penerapan alternatif kebijakan, *Ketiga*; Rekomendasi (preskripsi) yang menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari suatu pemecahan masalah, *Keempat*; Pemantauan (deskripsi) yang menghasilkan informasi tentang konsekuensi diterapkannya kebijakan, dan *Kelima*; Evaluasi yang menyediakan informasi mengenai nilai dan manfaat dari konsekuensi pemecahan masalah.

Para pembuat kebijakan memberikan informasi-informasi yang diperoleh tersebut, dapat dimanfaatkan oleh untuk dijadikan landasan dalam membuat keputusan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan

¹⁴¹ Dunn, W.N. *Pengantar analisis kebijakan publik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press.1999). h.56

bahwa analisis kebijakan adalah merupakan metode untuk menganalisis kebijakan mulai dari proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, mengomunikasikan pengetahuan dengan kebijakan hingga menilai secara kritis atau mengevaluasi sebuah kebijakan. Dengan demikian, analisis kebijakan, dapat digunakan sebagai pedoman berpikir dan bertindak dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan merupakan bagian dari proses analisis kebijakan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut merupakan rangkaian beberapa tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. *Pertama*, penyusunan agenda, pada tahap ini pihak pemerintah atau pejabat yang ditunjuk menempatkan masalah pada agenda publik dengan memperhatikan skala prioritas. *Kedua*, formulasi kebijakan, pemerintah atau pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.

Ketiga, adopsi kebijakan, alternatif kebijakan yang diadopsi diupayakan untuk mendapat dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antarlembaga atau keputusan pengadilan. *Keempat*, implementasi kebijakan, kebijakan yang telah diputuskan dilaksanakan

oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia, dan *Kelima*, Penilaian kebijakan, apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan Undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

M. Mutu Pendidikan

Mutu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan kepuasan pelanggan. Banyak faktor untuk mencapai mutu. Dalam kaitan ini peran dan fungsi sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) sangat dibutuhkan¹⁴². Sedangkan definisi mutu yang praktis yaitu sebuah derajat variasi yang standar digunakan dan memiliki kebergantungan pada biaya yang rendah¹⁴³.

Secara istilah mutu merupakan kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan¹⁴⁴. Dengan demikian mutu merupakan tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan. Berdasarkan tinjauan mutu pendidikan dari segi proses dan hasil, mutu pendidikan dapat dideteksi dari ciri-cirinya

¹⁴² Fattah.N. *Sistem penjaminan mutu pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).2012. 42

¹⁴³ Arcaro.J.S. *Pendidikan berbasis mutu*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2011).h. 21

¹⁴⁴ Nasution,M.N. *Manajemen mutu terpadu*. (Jakarta : Ghalia Indonesia).2014

yaitu memiliki kompetensi, relevansi, fleksibilitas, efisiensi, berdaya hasil, serta kredibilitas.

Mutu pendidikan merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Secara esensial istilah mutu menunjukkan kepada sesuatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang dan atau kinerjanya¹⁴⁵. Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka konsep mutu pendidikan adalah elit, karena hanya sedikit institusi yang dapat memberikan pengalaman pendidikan dengan mutu tinggi kepada anak didik.

Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan pendidikan menjadi visi yang sama yaitu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama semua stakeholders, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pada elemen terkecil yaitu guru. Sejauh mana kesungguhan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan, akan berdampak pada mutu pendidikan itu sendiri¹⁴⁶. Selama ini banyak pemikiran dan kebijakan

¹⁴⁵ Basyit, A. Implementasi manajemen mutu pendidikan islam. *Kordinat*, Vol. XVII No.1.187-210.2018

¹⁴⁶ Arbani, Dakir, and Umiarso, *Manajemen Mutu Pendidika* (Jakarta:

dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam yang diharapkan mampu memberikan nuansa baru bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Namun, dalam beberapa hal, pemikiran konseptual tersebut masih bersifat idealis romantis dan masih belum mampu menyesuaikan dengan realitas yang ada. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan dan realisasi kebijakan di lapangan. Target peningkatan mutu pendidikan akan tercapai apabila pemerintah daerah mampu menyelenggarakan rumah tangganya dengan tanggung jawab penuh dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Sehingga pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakankebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, strategi pengembangan pendidikan, dan memetakan permasalahan pendidikan yang ada di daerahnya.

Mutu dalam aspek pendidikan berkaitan dengan upaya dalam memberikan pelayanan terbaik yang mampu memuaskan para pengguna layanan jasa pendidikan. Dalam sistem penyelenggaraan pendidikan, aspek mutu (*quality*) berkaitan erat dengan bagaimana masukan peserta didik (*input*), pelaksanaan penyelenggaraan

pendidikan dan pembelajaran (proses), serta bagaimana keluaran lulusan yang dihasilkan¹⁴⁷.

Peningkatan mutu pendidikan Islam merupakan satu langkah awal penting yang harus dilakukan. Peningkatan mutu harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempergunakan dan memberdayakan semua aspek sumber daya yang ada. Strategi dasar untuk meningkatkan mutu secara berkesinambungan yaitu melalui peningkatan seluruh objek garapan dalam manajemen pendidikan Islam, dimulai dari peningkatan tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, proses pembelajaran, sarana prasarana pendidikan, keuangan dan hubungan dengan masyarakat.

Proses pendayagunaan sumber daya manusia maupun sumber-sumber lainnya harus mendukung pencapaian tujuan secara efektif dan efisien berdasarkan ukuran, kadar, ketentuan dan penilaian tentang kualitas sesuatu barang maupun jasa (produk) sesuai dengan kepuasan pelanggan. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif.

Mutu memiliki dua pengertian. Pertama, menyesuaikan diri dengan spesifikasi. Kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan. Mutu

¹⁴⁷ Dede Rosyada et al., Pendidikan Islam Isu Dan Inovasi, 2017.

dalam pandangan seseorang terkadang bertentangan dengan mutu dalam pandangan orang lain, sehingga tidak aneh jika ada pakar yang tidak mempunyai kesimpulan yang sama tentang bagaimana cara menciptakan institusi yang baik ¹⁴⁸. Mutu sebagai gambaran karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang akan atau yang tersirat.

Lebih luas lagi mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan hubungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan mutu pendidikan yaitu kualitas atau ukuran baik atau buruk lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan yang memiliki kompetensi, relevansi, fleksibilitas, efisiensi, berdaya hasil untuk mencapai tujuan pendidikan.

Mutu dibidang pendidikan meliputi mutu input, proses, dan output. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEMB (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan, dan Bermakna). Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik

¹⁴⁸ Umar, Y. *Manajemen pendidikan madrasah bermutu*. Bandung : PT. Refika Aditama 2016. h.65

dan non akademik siswa tinggi semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas. Mutu bermanfaat bagi dunia pendidikan karena 1) meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat dan atau pemerintah yang telah memberikan semua biaya kepada sekolah, 2) menjamin mutu lulusannya, 3) bekerja lebih professional, dan 4) meningkatkan persaingan yang sehat¹⁴⁹.

Manajemen mutu menurut Basyit¹⁵⁰ merupakan proses pendayagunaan sumber daya manusia maupun sumber-sumber lainnya yang mendukung pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. berdasarkan ukuran, kadar, ketentuan dan penilaian tentang kualitas sesuatu barang maupun jasa (produk) sesuai dengan kepuasan pelanggan. Strategi yang dikembangkan dalam penggunaan manajemen mutu dalam dunia pendidikan adalah institusi pendidikan memposisikan dirinya sebagai institusi jasa atau dengan kata lain menjadi industri jasa.

Pada era otonomi daerah, berbagai tantangan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan mengharuskan adanya reorientasi dan perbaikan sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan.

¹⁴⁹ Fattah.N. *Sistem penjaminan mutu pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.2012. h.34

¹⁵⁰ Basyit, A. Implementasi manajemen mutu pendidikan islam. *Kordinat*, Vol. XVII No.1.187-210.2018

Manajemen berbasis sekolah merupakan konsep manajemen yang memberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggungjawab yang luas bagi sekolah berdasarkan profesionalisme untuk menata organisasi sekolah, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya pendidikan yang tersedia dalam upaya peningkatan mutu pendidikan¹⁵¹. Berdasarkan uraian di atas pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah menjadi suatu keharusan yang berorientasi pada manajemen berbasis pendidikan.

Faktor-faktor yang mendukung efektifitas implementasi kebijakan mutu pendidikan antara lain: didukung oleh manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, penyediaan sumber-sumber yang cukup (manusia dan dana), dan partisipasi masyarakat. Faktor-faktor yang menghambat antara lain; kualitas sumberdaya manusia khususnya pada mutu tenaga kependidikan, keterbatasan sumber belajar dan media pembelajaran (Nadhirina, Soesilowati & Utomo, 2017:159).

Ada beberapa prinsip yang perlu dilaksanakan dalam menerapkan program mutu menurut¹⁵² diantaranya sebagai berikut. (1)

¹⁵¹Oemar Hamalik, *Manajemen pengembangan kurikulum*.Bandung: Remaja Rosdakarya.2010.h.23

¹⁵²Sastrawan, K. B. Profesionalisme Guru dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 65-73.2016

Peningkatan mutu menuntut kepemimpinan profesional dalam bidang pendidikan. (2) Sekolah harus belajar bekerja sama dengan sumber-sumber yang terbatas. (4) Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan kantor dinas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, team work, kerja sama, akuntabilitas, dan rekognisi. (7) Program peningkatan mutu dalam pendidikan membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan. (8) Peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program-program singkat.

Sekolah dapat merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan sendiri kebijakan, program, dan kegiatan sekolah, sepanjang untuk memajukan institusi sekolah dan meningkatkan mutu pendidikannya. Peningkatan mutu pendidikan sekolah harus menjadi bagian utama sedangkan masyarakat dituntut partisipasinya dalam peningkatan mutu yang telah menjadi komitmen sekolah demi kemajuan masyarakat¹⁵³.

Strategi peningkatan mutu pendidikan Islam harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan atau harapan pelanggan, maka dari

¹⁵³ Saifuddin, R. Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sinergi Kebijakan Antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 7(3), 253-253.2019

situlah layanan pendidikan Islam tentu saja harus memperhatikan setiap masing-masing kebutuhan pelanggan tersebut. Kepuasan dan kebanggaan dari mereka sebagai penerima manfaat layanan pendidikan harus menjadi acuan mendasar bagi program peningkatan mutu layanan pendidikan Islam¹⁵⁴.

Respon pemerintah terhadap mutu pendidikan secara umum sudah cukup tinggi setidaknya dalam satu dasawarsa terakhir. Beberapa kebijakan yang terkait hal tersebut ditunjukkan dengan terbitnya sejumlah Undang Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri (Permen) dalam bidang pendidikan yang di dalamnya turut mengangkat dan mengakomodasi tentang mutu pendidikan. Dapat dikatakan bahwa pengembangan dan peningkatan mutu menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam pembangunan pendidikan untuk kemudian ditindaklanjuti dalam kebijakan.

Mutu pendidikan madrasah dapat dilihat dari berbagai aspek yang bisa disederhanakan menjadi empat varian yaitu masukan, proses, luaran, dan dampak. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi.

¹⁵⁴ Sumiharyati, S., & Arikunto, S. Evaluasi program in-service training guru SMK di BLPT Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(2), 160-173.2019

Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah dan lain-lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang perangkat lunak, Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.

Mutu proses pembelajaran mengandung makna bahwa kemampuan sumber daya sekolah mentransformasikan multi jenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu dari peserta didik. Pendidikan nasional yang lulusannya bermutu merupakan suatu keniscayaan. Untuk menghasilkan lulusan bermutu, dalam sistem pendidikan nasional perlu dipertajam upaya-upaya penjaminan mutu (*quality assurance*) dan pengendalian mutu (*quality control*). Penjaminan mutu mengharuskan upaya penentuan standar kemampuan dari sisi masukan pembelajar untuk setiap jenjang pendidikan, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, sarana

dan prasarana serta pembiayaan yang difokuskan guna menghasilkan output pendidikan yang bermutu¹⁵⁵.

Meningkatkan mutu madrasah menurut¹⁵⁶ melibatkan lima faktor yang dominan : (1) kepemimpinan kepala sekolah; (2) siswa sebagai pusat; (3) pelibatan guru secara maksimal; (4) kurikulum yang dinamis; (5) jaringan kerjasama. Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat. Pendekatan yang harus dilakukan adalah berpusan pada siswa (*student centre approach*) sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali dan ditingkatkan.

Secara umum, ada dua teori umum yang berkembang tentang pencapaian mutu pendidikan. Pertama, teori yang mengatakan bahwa pencapaian mutu pendidikan sangat ditentukan oleh faktor input. Dalam hal ini faktor input meliputi kurikulum, perencanaan dan evaluasi, ketenagaan, kesiswaan, sarana dan fasilitas, iklim sekolah,

¹⁵⁵ Mustari, M, & Rahman, M.T. *Manajemen pendidikan*. Raja Grafika Persada: Jakarta. 2014

¹⁵⁶ Daryanto. *Standar Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru Profesional*. Yogyakarta: Gava Media. 2013), h. 157

dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Kedua, teori yang menekankan pada proses pengelolaan kelembagaan proses pengelolaan program, proses pengambilan keputusan, proses pembelajaran, dan proses monitoring evaluasi.

Mengantisipasi permasalahan-permasalahan di atas, pemerintah melalui kebijakan pendidikan antara lain: 1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. 2) meningkatkan kemampuan akademik dan profesional tenaga kependidikan. 3) melakukan pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.

Melakukan pembaharuan dan pematapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien¹⁵⁷. Manajemen yang berusaha membuat setiap komponen pesantren

¹⁵⁷ Mustari, M, & Rahman, M.T. *Manajemen pendidikan*. Raja Grafiika Persada: Jakarta. 2014

berkualitas secara menyeluruh, mulai dari pengadaan sampai hasil akhir. TQM merangkum semua pengertian dari konsep tentang kualitas, karenanya disebut sebagai pengelolaan kualitas secara menyeluruh.

Menurut¹⁵⁸ Ada 13 karakteristik yang dinilai dalam hal mutu pendidikan yaitu kinerja (*performan*), waktu wajar (*timelines*), handal (*reliability*), daya tahan (*durability*), indah (*aesteties*), hubungan manusiawi (*personal interface*), mudah penggunaannya (*easy of use*), bentuk khusus (*feature*), standar tertentu (*comformence to specification*), konsistensi (*concistency*), seragam (*uniformity*), mampu melayani (*serviceability*), dan ketepatan (*acuracy*). Pemahaman dan persepsi dalam hal standar mutu pendidikan terdapat perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang antara pakar satu dengan pakar lainnya.

Perbedaan berdasarkan tolak ukur kondisi sekolah, prestasi hasil belajar, dan mutu pendidikan perlu ditinjau dari berbagai tolak ukur yang relevan. Bahwa lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika input, proses, dan hasilnya dapat memenuhi persyaratan yang dituntut

¹⁵⁸ Husaini Usman. *Manajemen: teori, praktik & riset pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara.2014)h.23

oleh pengguna jasa pendidikan¹⁵⁹. Menurut¹⁶⁰ output dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan nonakademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatannya lulusannya dan merasa puas.

Perbedaan persepsi tentang mutu pendidikan merupakan hal wajar, karena masing-masing pihak mendefinisikannya dari sudut pandang dan kemampuan dalam menganalisis yang beragam. Badan/lembaga pelaksana yang terlibat dalam kegiatan penjaminan mutu, baik tingkat, dasar, menengah maupun perguruan tinggi adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BANPNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidik.

¹⁵⁹ Triwiyanto, T. Pemetaan mutu manajemen berbasis sekolah melalui audit manajemen pendidikan. *Manajemen Pendidikan*, 24(2)125-134.2013

¹⁶⁰ Husaini Usman. *Manajemen: teori, praktik & riset pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara.2014)h.23

N. Kerangka Pikir

Latar belakang diadakannya *In Service Training* sebagai tolak ukur peningkatan keprofesionalisme guru yaitu kenyataan bahwa sebagian besar guru masih *underqualified* atau tidak memenuhi syarat dalam penguasaan bahan ajar dan masih kurangnya keterampilan menggunakan metode yang inovatif dalam pembelajaran. Kurangnya profesionalisme guru menjadi topik pembicaraan dan banyak dibahas dalam seminar maupun penelitian. Pentingnya program *inservice training* melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Pendidikan Agama Islam untuk memberikan pelatihan kepada guru PAI dalam rangka mengembangkan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) merupakan pengembangan kemampuan guru, yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan yang dimiliki oleh guru penting untuk ditingkatkan maka perlu dilakukan kegiatan *In Service Training* (pelatihan dalam jabatan). Hal ini dimaksudkan agar guru dan tenaga kependidikan yang ada dapat

meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki secara efektif dan efisien. Program *In Service Training* ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh guru seperti berupa pelatihan, workshop, seminar, kursus dan lain sebagainya yang dilakukan oleh internal maupun eksternal kelembagaan.

Dampak program *in-service training* yang berpengaruh terhadap peningkatan profesional guru secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan guru yang mengikuti pelatihan lebih kompeten di banding guru yang tidak terlatih, baik dalam hal kompetensi pedagogik, manajemen, kompetensi penilaian, kompetensi penelitian. Hasil penelitian terdahulu bahwa terdapat pengaruh *Inservice training and upgrading* terhadap kinerja guru Pendidikan Agama Islam. Dimana semakin sering melakukan *inservis training* dan *upgrading* maka secara otomatis kinerja guru akan semakin baik pula.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan *Inservice-training* adalah menjadi guru yang profesional. Guru merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, tidak semua orang bisa menjadi guru tanpa ilmu yang ia miliki. Sebutan “guru professional” mengacu pada guru yang telah mendapat pengakuan secara formal berdasarkan

ketentuan yang berlaku, baik dalam kaitan dengan jabatan maupun latar belakang pendidikan formalnya. Guru yang professional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru yang telah orang tua peserta didik percayakan untuk mendidik anaknya peserta didik¹⁶¹. Dengan demikian suatu program pelatihan diselenggarakan untuk mengubah apa yang pegawai ketahui, bagaimana mereka bekerja, atau sikap mereka terhadap pekerjaan, rekan kerja, manajer, dan organisasi dimana mereka bekerja. Dengan kata lain tujuan utama pelatihan adalah agar para pegawai dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien.

In-service training merupakan bentuk pelatihan formal yang terencana dan diberikan kepada sekelompok personil yang dibatasi yang memiliki klasifikasi pekerjaan yang sama atau tanggung jawab pekerjaan yang sama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *in-service training* merupakan usaha pengembangan profesionalisme pegawai dalam bentuk pelatihan formal yang diberikan kepada para pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Berdasarkan pendapat ini, maka *in-service training* dalam pengembangan profesionalitas guru diberikan kepada guru-guru yang

¹⁶¹ Putri, A. D. K., & Imaniyati, N. Pengembangan profesi guru dalam meningkatkan kinerja guru. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 2(2), 93-101.2017

mengampu mata pelajaran yang sama yang diselenggarakan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di tingkat Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas, serta oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) di tingkat sekolah dasar.

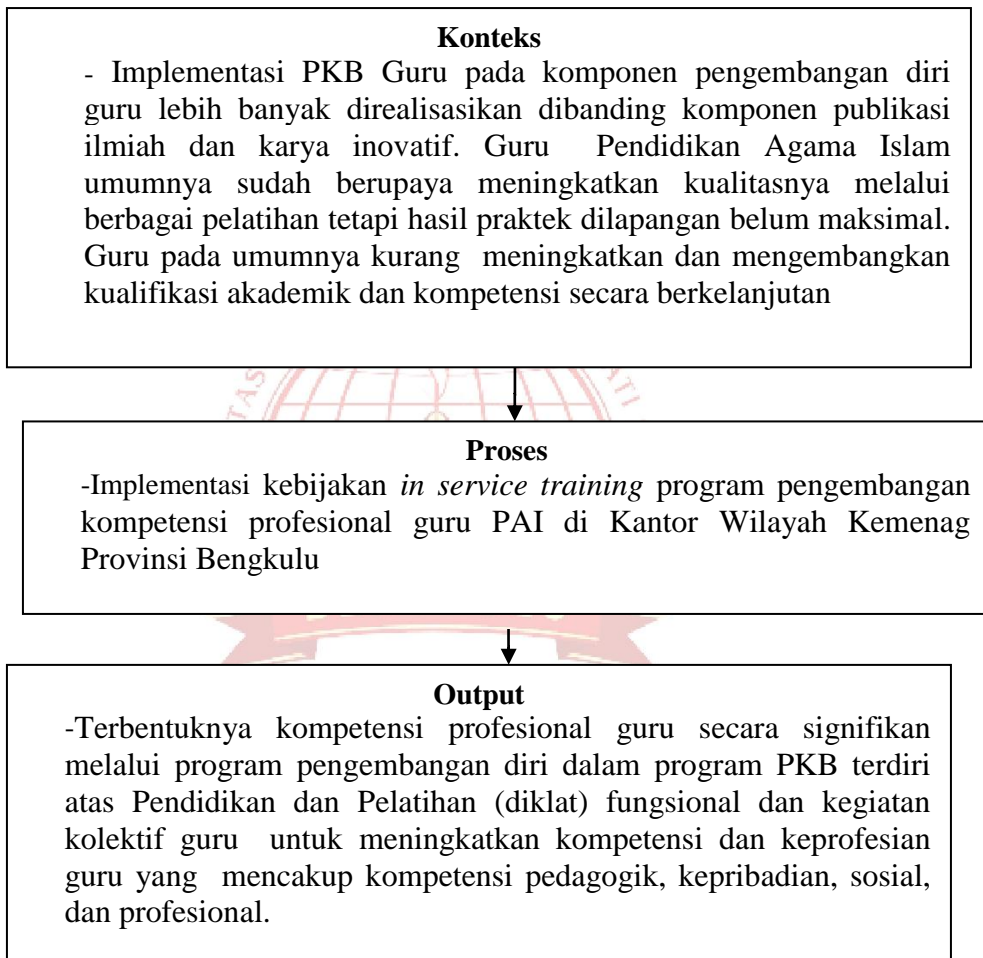
Melaksanakan pelatihan dalam jabatan (*in-service training*) adalah faktor kunci untuk melakukan perubahan dalam paradigma pembelajaran. *In-service training* ini dimaksudkan agar para guru tetap memiliki pengetahuan yang terkini up-to-date) tentang isi kurikulum, terus mengembangkan strategi pengajaran dan penilaian kelas serta, mengembangkan peranan kepemimpinan di dalam kelas¹⁶².

Guru akan memiliki tingkat kemampuan yang sangat tinggi, ketika mampu melakukan pekerjaannya secara profesional. Di dorong oleh inovasi yang semakin hari semakin berkembang, menjadikan seorang guru harus selalu up-date, baik dari teknologi maupun informasi. Agar dapat mencapai tingkatan tersebut, seorang guru haruslah melakukan *training service* atau yang di sebut pelatihan lanjutan. Manfaat yang didapat dalam melaksanakan *In Service Training* adalah untuk menambah dan mempertinggi mutu pengetahuan, meningkatkan kecakapan dan pengalaman pendidik

¹⁶² 7Christopher Day, *Developing Teachers: The Challenges of Lifelong Learning*, (Philadelphia, Falmer Press, 1999), h. 148.

sebagai modal dalam melaksanakan proses belajar mengajar ¹⁶³ .

Berdasarkan uraian di atas disajikan bagan kerangka pikir penelitian di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir

¹⁶³ Sudana, I. M. (2011). Analisis Meta Pada Manajemen Pasca Pelatihan Untuk Meningkatkan Produktivitas Guru Di SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 143-144.